

**PENGARUH PARTISIPASI DAN PENGAWASAN MASYARAKAT
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
BRAKAS KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh:

Ainun Naim

1905046026

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
Ainun Naim

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim

Setelash meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya. Dengan ini, saya kirim naskah Skripsi atas nama:

Nama : Ainun Naim

NIM : 1905046026

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : PENGARUH PARTISIPASI DAN PENGAWASAN
MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BRAKAS
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK.

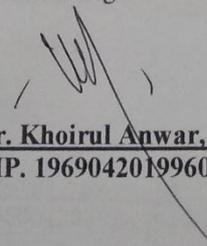
Dengan ini, saya mohon kiranya Skripsi ini untuk dapat segera dimunaqosahkan.
Terimakasih atas perhatiannya dan harap maklum adanya.

Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq

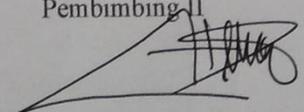
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 7 Maret 2023

Pembimbing I


Dr. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 196904201996031002

Pembimbing II


Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si
NIP. 198511062015031007

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Pengaruh Partisipasi Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak**

Penulis : Ainun Naim
NIM : 1905046026
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude pada tanggal **3 April 2023**.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 3 April 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Septiana Na'afi, M.S.I
NIP. 198909242019032018

Penguji Utama I

Henny Yuningrum, S.E, M.Si
NIP. 198106092007102005

Pembimbing I

Dr. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 196904201996031002

Sekretaris Sidang

Dr. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 196904201996031002

Penguji Utama II

Riska Wijayanti, M.H
NIP. 199304082019032019

Pembimbing II

Dr. Setvo Budi Hartono, M.Si
NIP. 198511062015031007



MOTTO

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

lahû mu‘aqqibâtum mim baini yadaihi wa min khalfihî yahfadhûnahû min amrillâh, innallâha lâ yughayyiru mâ biqauimin ḥattâ yughayyirû mâ bi'anfusihim, wa idzâ arâdallâhu biqauimin sû'an fa lâ maradda lah, wa mâ lahum min dûnihî miw wâl

Artinya: Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. QS. Ar-Ra'd: Ayat 11 (Juz 13)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yakni bapak Sarmian dan ibu Misrotul Izzah, serta kedua adik saya yakni Umar Fariq dan Eva Nur Anisa.
2. Segenap keluarga besar kampus tercinta UIN Walisongo Semarang mulai dari jajaran rektorat, dekanan, bapak/ibu dosen, dan semua elemen yang ada di dalamnya.
3. Segenap keluarga Besar PMII Rayon Ekonomi Komisariat UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini adalah tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan dan tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 1 Maret 2023

Deklarator

Ainun Naim

NIM 1905046026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Śā'	<i>Ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Żal	<i>Ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Şād	<i>Ş</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>Ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>Ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
و	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Waw	<i>W</i>	-
ي	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

B. Vokal

No.	Harakat Arab	Nama	Huruf Latin
1	◌َ	Fathah	ditulis 'a'
2	◌ِ	Kasrah	ditulis 'i'
3	◌ُ	Dlammah	ditulis 'u'

C. Diftong

◌َ + ي	Fathah + ya' mati	ditulis ai	بينكم Bainakum
◌َ + و	Fathah + wawu mati	ditulis au	قول Qaul

D. Syaddah

د	ditulis dd	عدة	'Iddah
ن	ditulis nn	من ا	Minna

E. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan ditulis dengan h :

حكمة	Hikmah
جزية	Jizyah

b. Bila ta' marbutah hidup atau berharakat maka ditulis t :

زكاة الفطر	Zakât al-fiṭr
حياة الإنسان	Ḥayât al-insân

F. Kata Sandang Alif+Lam

Al-qamariah	القرآن	al-Qur'ân
Al-syamsiyah	السماء	al-Samâ

ABSTRAK

Pada hakekatnya, anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada desa harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu, sebagai upaya mendukung terwujudnya pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan mensejahterakan masyarakat, diperlukan peran serta setiap bagian dari desa itu sendiri, seperti halnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat. Partisipasi merupakan suatu proses keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang bertujuan memberikan saran dan masukan, serta mengevaluasi kinerja pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan yang akan dibuat. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah adanya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Masyarakat memiliki peranan strategis untuk mengawasi realisasi pengelolaan dana desa supaya tidak diselewengkan. Mengingat dana desa yang diberikan oleh pemerintah jumlahnya adalah cukup besar maka diperlukan mekanisme berupa pengawasan masyarakat supaya dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya yakni untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sampel penelitian ini adalah masyarakat desa Brakas yang berumur 17 keatas atau sudah mempunyai hak pilih dengan sampel sebanyak 100. Jenis penelitian adalah kuantitatif dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Pengujian data menggunakan SPSS versi 25. Hasil analisis menunjukkan variabel partisipasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai signifikan akuntabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dan variabel Pengawasan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai signifikan akuntabilitas sebesar $0,054 > 0,05$.

Kata kunci: Partisipasi, Pengawasan Dana, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

In essence, the budget given by the government to villages must be used and allocated in accordance with what has been regulated in Law Number 23 of 2014 and the provisions set by the Indonesian government. For this reason, as an effort to support the realization of village development that is in accordance with the needs of the community's welfare, the participation of every part of the village itself is needed, as well as the participation and supervision of the community. Participation is a process of community involvement in government activities that aims to provide advice and input, as well as evaluate government performance as material for consideration in formulating policy directions to be made. In addition, what is no less important is the existence of community oversight of the management of village funds. The community has a strategic role in overseeing the realization of village fund management so that it is not diverted. Considering that the village funds provided by the government are quite large, a mechanism is needed in the form of community oversight so that these funds are used according to their designation, namely for the benefit of community welfare.

The sample for this research was the people of Brakas village aged 17 and above or who already had the right to vote with a sample of 100. The type of research was quantitative and the sampling technique was carried out by purposive sampling. Testing the data using SPSS version 25. The results of the analysis show that the participation variable (X1) has a significant effect on village fund management accountability with a significant accountability value of $0.000 < 0.05$ and the Supervision variable (X2) has no significant effect on village fund management accountability with a significant value of accountability of $0.054 > 0.05$.

Keywords: Participation, Fund Monitoring, Village Fund Management Accountability.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “PENGARUH PARTISIPASI DAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BRAKAS KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan, do'a dan dukungan, serta dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag beserta segenap jajaran birokrasi UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag beserta segenap jajaran Dekanat FEBI UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Bapak Warno, SE., M.Si., SAS serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Wali dosen Ibu Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, M.Si yang senantiasa menjadi orang tua di kampus.
5. Dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Khoirul Anwar, M.Ag dan dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si yang telah membimbing dan mengarahkan proses pembuatan skripsi ini.
6. Segenap dosen S1 Akuntansi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.

7. Kedua orang tua saya, Bapak Sarmian dan Ibu Misrotul Izzah yang mana berkat do'a dan dukungannya saya bisa menyelesaikan studi S1 ini sehingga bisa mendapatkan gelar sarjana. Serta kedua adik saya, Umar Fariq dan Eva Nur Anisa yang menjadi bagian dari semangat saya.
8. Kepala desa Brakas beserta jajaran pemerintahan desa yang telah mengizinkan dan membantu penelitian skripsi ini.
9. Seseorang yang istimewa bernama Najla Zainiyya Gharera, kalau ini tidak bisa didefinisikan karena menjadi bagian teristimewa dalam hati.
10. Keluarga besar PMII Rayon Ekonomi UIN Walisongo Semarang yang senantiasa menjadi tempat berproses, belajar, berkhidmat, sekaligus menjadi tempat yang memberikan banyak pembelajaran berharga.
11. Semua pihak yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis percaya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wallahumuwafiq Ila Aqwamithariq

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 7 Maret 2023

Penulis

Ainun Naim

NIM 1905046026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN.....	III
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI.....	VI
TRANSLITERASI.....	VII
ABSTRAK.....	IX
KATA PENGANTAR.....	XI
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR TABEL.....	XVI
DAFTAR GAMBAR	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kerangka Teori.....	12
2.1.1 Dana Desa.....	12
2.1.1.1 Pengertian Desa.....	12
2.1.1.2 Pengertian Dana Desa.....	14
2.1.1.3 Tujuan Dana Desa.....	16
2.1.2 Partisipasi.....	17
2.1.2.1 Pengertian Partisipasi.....	17
2.1.2.2 Tahap-tahap partisipasi.....	19
2.1.2.3 Unsur-unsur Partisipasi Masyarakat.....	19
2.1.2.4 Manfaat Penerapan Partisipasi Masyarakat.....	20
2.1.3 Pengawasan Dana.....	20

2.1.3.1	Pengertian Pengawasan Dana.....	20
2.1.3.2	Tujuan Pengawasan.....	22
2.1.3.3	Pedoman Pengawasan.....	23
2.1.4	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	24
2.1.4.1	Pengertian Pengelolaan Dana.....	24
2.1.4.2	Asas-asas Pengelolaan Dana Desa.....	24
2.1.4.3	Tahap-tahap Pengelolaan Dana Desa.....	24
2.2	Penelitian Terdahulu.....	27
2.3	Kerangka Berfikir.....	29
2.4	Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III	METODE PENELITIAN.....	32
3.1	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.2	Populasi dan Sampel.....	32
3.2.1	Populasi.....	32
3.2.2	Sampel.....	33
3.3	Metode Pengambilan Data.....	34
3.4	Metode Penelitian dan Pengukuran.....	34
3.5	Teknik Analisis Data.....	37
3.5.1	Uji Validitas.....	37
3.5.2	Uji Reliabilitas.....	38
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.5.3.1	Uji Normalitas.....	38
3.5.3.2	Uji Multikolonietas.....	39
3.5.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	39
3.5.4	Analisis Regresi.....	40
3.5.4.1	Analisis Regresi Linier Berganda.....	40
3.5.4.2	Koefesien Determinasi (R ²).....	41
3.5.4.3	Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	41
3.5.4.4	Uji Statistik T.....	41
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1	Gambaran Umum dan Sejarah Desa Brakas.....	43

4.1.2 Struktur Organisasi.....	44
4.1.3 Deskriptif Data Penelitian.....	46
4.2 Karakteristik Responden.....	46
4.2.1 Usia Responden.....	46
4.2.2 Jenis Kelamin.....	47
4.2.3 Pekerjaan.....	48
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian.....	49
4.3.1 Kualitas Partisipasi.....	50
4.3.2 Kualitas Pengawasan.....	50
4.3.3 Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana.....	50
4.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	51
4.4.1 Uji Validitas.....	51
4.4.2 Uji Reliabilitas.....	53
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.5.1 Uji Normalitas.....	53
4.5.2 Analisis Statistik.....	55
4.5.3 Uji Multikolinearitas.....	56
4.5.4 Uji Heteroskedastisitas.....	57
4.5.5 Analisis Regresi Linier.....	58
4.5.6 Uji Koefisien Determinan.....	59
4.5.7 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	60
4.5.8 Uji Parsial (Uji Statistik T).....	61
4.6 Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR LAMPIRAN.....	68
BIODATA PENELITI.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Variabel, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran.....	35
Tabel 4.1 : Struktur organisasi Desa Brakas.....	45
Tabel 4.2 : Persentase Usia Responden.....	47
Tabel 4.3 : Persentase Jenis Kelamin Responden.....	47
Tabel 4.4 : Persentase Pekerjaan Responden.....	48
Tabel 4.5 : Data Hasil Kuesioner.....	49
Tabel 4.6 : Uji Validitas Instrumen Partisipasi (X1).....	51
Tabel 4.7 : Uji Validitas Instrumen Pengawasan (X2).....	52
Tabel 4.8 : Uji Validitas Instrumen Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Y).....	52
Tabel 4.9 : Uji Reliabilitas Instrument.....	53
Tabel 4.10 : Uji Normalitas K-S.....	55
Tabel 4.11 : Uji Multikolinieritas.....	56
Tabel 4.12 : Uji Analisis Regresi Linier.....	58
Tabel 4.13 : Uji Koefisien Determinan (R).....	60
Tabel 4.14 : Uji Statistif (F).....	61
Tabel 4.15 : Uji Parsial (T).....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 : Grafik Histogram Uji Normalitas.....	54
Gambar 4.2 : Uji Plot Gambar Normalitas.....	54
Gambar 4.3 : Scatterplot.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 desa diartikan sebagai suatu kesatuan hukum yang di dalamnya terdapat masyarakat dengan batas wilayah serta mempunyai hak untuk membuat kebijakan serta bertanggung jawab kepada masyarakat yang berada di wilayah tersebut berdasarkan adat istiadat yang diakui oleh pemerintahan dan dihormati oleh Negara Kesatuan Indonesia. Artinya desa berhak mengatur dan memajukan pembangunan di daerahnya sendiri dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang terstruktur, unik, serta berasal dari asal usul tertentu dimana asas penyelenggarannya berdasarkan keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003).

Desa merupakan salah satu komponen sejarah pembangunan nasional dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan negara. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan desa masih jauh dari kata maju dan berkembang. Pada tahun 2014, undang-undang desa diperkenalkan untuk mengatur banyak hal atau yang kemudian dikenal dengan otonomi desa. Adanya peraturan mau tidak mau menimbulkan otoritas pemerintahan desa, hal ini harus diimbangi dengan manajemen desa yang baik dan ideal bagi mereka untuk melakukan pelayanan yang baik untuk melakukan pengelolaan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintahan daerah merupakan suatu kebijakan tepat untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan memiliki banyak jenis suku, budaya, bahasa, agama, serta kaya akan sumber daya alam. Dalam kehidupan nyata di negara Indonesia ini terdapat berbagai jenis masyarakat atau kepribadian dengan segala kepribadiannya.

Runtuhnya rezim Orde Baru menciptakan sistem baru, yaitu desentralisasi atau daerah otonom yang pemerintahannya tidak lagi terpusat pada ibu kota negara Indonesia dan terdesentralisasi untuk setiap daerah. Di era otonomi daerah, pemerintah daerah berhak mengarahkan aparatur pemerintah dalam

bidangnya masing-masing. Berdasarkan apa yang tertulis dalam hukum Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi:

“Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pekerjaan pemerintah dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan tersebut rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang sumber pendapatan dana desa, yaitu berupa penyaluran pendapatan asli desa, pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, anggaran yang dialokasikan oleh APBN, keuangan dari APBD kabupaten/kota, serta hadiah yang sifatnya tidak mengikat dari pihak ketiga. Kemudian, dana desa digunakan untuk menjalankan semua peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa yang meliputi pelaksanaan program pemerintah, pemanfaatan sumber daya masyarakat, pembangunan, serta agenda-agenda desa yang lain (Hartono, 2021).

Penghimpunan dan pengelolaan dana desa harus mencakup program-program yang dibutuhkan masyarakat seperti pembangunan fisik. Namun pelaksanaannya seringkali tidak mengikuti aturan yang seharusnya, kasus yang paling sering terjadi adalah terkait volume dan kualitas yang kurang baik, ada juga yang tidak dilaksanakan sama sekali.

Dalam interaksi sosial diperlukan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dana desa. Jadi, mengkomunikasikan atau melibatkan masyarakat dalam tanggung jawab dana desa bukan sekedar retorika atau “citra”. Namun, benar-benar dapat memenuhi kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga pengelolaan dana desa dapat lebih berkualitas atau lebih baik dari sebelumnya. Badan desa harus berkonsultasi dengan masyarakat tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa untuk menawarkan opsi atau solusi alternatif, memberikan informasi atau penjelasan yang lengkap dan terperinci, dan

menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi atau meninjau kebijakan dan kualitas dana desa (Yohanes, 2020).

Pemerintah desa dinilai mampu menggunakan kekuatan ataupun terobosan-terobosan tertentu untuk membangun desa dengan memanfaatkan potensinya, akan tetapi juga dapat melengkapi permasalahan atau konflik desa secara cepat, namun realitas pelaksanaannya di lapangan tidak semulus yang diharapkan. Berdasarkan informasi penyelewengan dana dari Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2015 hingga 2018, 181 kasus ditemukan sedikitnya 184 orang menjadi tersangka yang mengakibatkan kerugian mencapai kurang lebih 40,6 miliar, adanya kasus penyelewengan dana pada pemerintahan desa meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan kasus yang ditemukan tersebut, 141 merupakan kasus yang pelakunya merupakan kepala desa (Indonesia Corruption Watch, 2023). Hal itu juga menunjukkan maraknya penyalahgunaan dana desa, berdasarkan informasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan catatan dari Kementerian Desa sekurangnya telah menerima 200 laporan pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi dari 600 laporan penyalahgunaan dana desa, yang tak kurang dari 60 laporan masuk ke KPK. Menurut temuan LSM Jaringan Paralel Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat jahat aparat desa, melainkan karena kurangnya pemahaman aparat desa tentang penggunaan rumah tangga. dan pengelolaan dana desa yang tidak efisien. Selain itu, faktor lainnya adalah karena lemahnya kontrol baik dari negara maupun masyarakat itu sendiri.

Adapun pemanfaatan Dana Desa pada tahun 2019 – 2020 juga diarahkan guna mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait pandemi Covid- 19, Dana Desa juga dipergunakan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga desa yang terdampak. Data yang dipergunakan untuk menghitung pagu Dana Desa berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Dalam Negeri menyediakan data jumlah desa dan jumlah penduduk, Kementerian Desa

menyiapkan data Indeks Desa Membangun (IDM) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Pendapatan Asli Desa (PADes), Kementerian Sosial menyerahkan data jumlah penduduk miskin, dan Kementerian Keuangan menyediakan data kinerja penyerapan dan capaian keluaran (affair) Dana Desa. Sementara itu, data luas wilayah serta data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Seluruh data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan formula pengalokasian Dana Desa, yang meliputi Alokasi Dasar (65), Alokasi Formula (30), Alokasi Afirmasi (1), dan Alokasi Kinerja (4). Capaian outgrowth dari penyaluran Dana Desa selama tahun 2015 sampai dengan 2020 bisa dilihat dari indikator jumlah penduduk miskin di desa. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2015 sebanyak, 89 juta jiwa dan terjadi penurunan menjadi, 26 juta jiwa pada Maret 2020.

Dari data ini bisa dilihat bahwa pemanfaatan Dana Desa berpengaruh positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di desa, sebelum pandemi Covid-19 melanda di Indonesia. Selama tahun 2015 sampai dengan 2020, Dana Desa telah menghasilkan beragam capaian affair berupa infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup di desa. Infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat berupa jalan desa (261.877 km), jembatan (1.494.804 cadence), pasar desa (11.944 unit), BUMDES (39.844 kegiatan), tambatan perahu (7.007 unit), embung(5.202 unit), irigasi (76.453 unit), dan sarana olahraga (27.753 unit). Dana Desa juga dipergunakan untuk membangun infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meliputi penahan tanah (237.415 unit), air bersih (1.281.168 unit), sarana MCK (422.860 unit), Polindes (11.599 unit), drainase (42.846.367 cadence), PAUD desa (64.429 kegiatan), Posyandu (40.618 unit), dan sumur warga (58.259 unit). Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2022 adalah untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan guna pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan untuk mendukung kinerja daerah.

Adapun kebijakan Dana Desa tahun 2022 berupa penyempurnaan kebijakan pengalokasian, perbaikan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan

penggunaan, serta penerapan sanksi penghentian penyaluran apabila terdapat desa bermasalah atau Kepala Desa menyalahgunakan Dana Desa. Penyempurnaan kebijakan pengalokasian meliputi perbaikan formula perhitungan dan bobot alokasi, penyaluran langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDes), serta program perlindungan sosial berupa BLT dan mengutamakan tenaga kerja dan bahan baku lokal dalam pembangunan infrastruktur. Penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa tahun 2022 diharapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap proses penyaluran dan pemanfaatannya.

Pertama, perbaikan formula perhitungan dengan memperluas cluster alokasi dasar berdasarkan jumlah penduduk yang sebelumnya 5 cluster menjadi 7 cluster dimaksudkan agar lebih mencerminkan keadilan. Selain itu, ada penurunan nominal alokasi afirmasi per desa agar desa tertinggal dan desa sangat tertinggal mempunyai motivasi yang lebih untuk mendapatkan alokasi kinerja yang lebih besar. Terdapat pula penajaman kriteria dan bobot, dengan cara memperkecil porsi alokasi formula yang sebelumnya 31 persen menjadi 30 persen dan selisihnya digunakan untuk memperbesar porsi komponen alokasi kinerja, yang sebelumnya 3 persen menjadi 4 persen guna memotivasi semua desa agar meningkatkan status dan kinerjanya.

Kedua, perhitungan dan penetapan pagu Dana Desa per desa oleh Pemerintah diharapkan makin mempercepat proses penyaluran langsung dari RKUN ke RKDes. Selama ini, perhitungan dan penetapan Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan ditetapkan secara resmi dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Proses penetapan Perkada ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga mengakibatkan penyaluran Dana Desa menjadi terhambat karena belum ada dasar hukumnya. Dengan penetapan Dana Desa secara langsung oleh Pemerintah, maka Pemda bisa segera mengajukan penyaluran pada awal tahun anggaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Penyaluran Dana Desa langsung dari RKUN ke RKDes bertujuan agar desa bisa langsung memanfaatkan Dana Desa yang mereka peroleh sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Ketiga, penguatan fokus dan prioritas

pemanfaatan Dana Desa dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid- 19. Di tengah situasi pandemi saat ini, Dana Desa dimanfaatkan untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa dengan target sebanyak 8 juta Keluarga Penerima Manfaat(KPM). Dana Desa juga digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan suppressing dan penanganan Covid- 19 di desa. Selain itu, Dana Desa dimanfaatkan untuk program pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Sehingga, pemanfaatan Dana Desa diharapkan bisa seimbang antara penanganan Covid-19 dan pembangunan infrastruktur di desa.

Dana Desa tahun 2022 diharapkan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi pada position desa, namun terdapat tantangan yang harus dihadapi dan diatasi agar Dana Desa bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pertama, kualitas sumber daya manusia pengelola Dana Desa yang tidak merata antar desa. Pengajuan Dana Desa mempersyaratkan dokumen yang harus dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa. Dokumen tersebut sebagian besar merupakan affair dari aplikasi untuk mempermudah pengisian data dan pelaporan Dana Desa. Sehingga, aparat desa harus paham teknologi dan memiliki infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Selain itu, kebijakan terkait Dana Desa bersifat dinamis menyesuaikan dengan kondisi terkini. Perubahan peraturan harus segera disikapi dan ditindaklanjuti dengan cepat agar tidak menghambat proses penyaluran Dana Desa. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Dana Desa melalui peningkatan penyediaan kualitas base data serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa.

Kedua, terdapat potensi desa yang bermasalah secara hukum atau malah Kepala Desa menyalahgunakan Dana Desa yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahun 2019, ada kasus beberapa desa yang bermasalah secara hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Desadesa tersebut tidak disalurkan Dana Desanya sampai dengan adanya kejelasan status hukumnya. Kasus

penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa terjadi di beberapa daerah, bahkan banyak yang sudah dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib. Kasus- kasus seperti ini yang bisa menghambat penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa, karena terdapat kebijakan pengenaan sanksi dari Pemerintah berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau penyalahgunaan oleh Kepala Desa. Oleh karena itulah, diperlukan peningkatan pengawasan Dana Desa oleh aparat pengawasan yang berwenang, agar penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Terakhir, situasi pandemi yang mungkin masih berlangsung sepanjang tahun 2022 berpotensi untuk menghambat penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa. Apalagi sudah muncul varian Omicron pada Desember 2021, yang masih belum jelas dampaknya pada tahun 2022. Prioritas Dana Desa tahun 2022 memang difokuskan guna penanganan dan pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Namun, perlu diwaspadai situasi akibat pandemi yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat di desa. Pemerintah tentunya telah menyiapkan langkah- langkah guna menangani pandemi, salah satunya dengan mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat. Menurut data dari Kementerian Kesehatan sampai dengan 24 Desember 2021, penduduk yang mendapatkan vaksin dosis pertama sudah mencapai 75 persen dan untuk dosis kedua sebanyak 53 persen. Dengan percepatan program vaksinasi nasional dan pelaksanaan protokol kesehatan, diharapkan bisa mengurangi dampak pandemi Covid- 19.

Pada hakekatnya, anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah harus digunakan dan dialokasikan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu, sebagai upaya mendukung terwujudnya pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan mensejahterakan masyarakat, diperlukan peran serta setiap bagian dari desa itu sendiri, seperti halnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat.

Jika semua elemen masyarakat dalam lingkup pemerintah desa saling bersinergi demi mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan apa yang diharapkan maka tujuan dari adanya dana desa akan dapat terpenuhi yaitu

mensejahterakan dan memajukan masyarakatnya. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia merupakan bentuk kongkrit bahwa pemerintah benar-benar serius dalam mengupayakan kemajuan desa sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, pejabat-pejabat pemerintah desa harus senantiasa mentaati aturan tersebut untuk menggunakan atau mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya.

Partisipasi merupakan suatu proses di mana masyarakat berpartisipasi dalam tindakan pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan saran, masukan, serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan yang akan dibuat. Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan terhadap pembangunan desa adalah seberapa besar partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap program pembangunan termasuk didalamnya mengidentifikasi dan menggali potensi yang ada di masyarakat (Huraerah). Untuk melaksanakan program desa sesuai dengan kebutuhan pembangunan, semua bagian desa harus dilibatkan, yang terpenting adalah setiap dari masyarakat harus berpartisipasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang berdaulat di tanah ini (Adisasmita, 2006).

Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah adanya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Masyarakat memiliki peranan strategis untuk mengawasi realisasi pengelolaan dana desa supaya tidak diselewengkan. Mengingat dana desa yang diberikan oleh pemerintah jumlahnya adalah tidak sedikit maka dibutuhkan sebuah sistem berupa pengawasan dari masyarakat supaya dana yang diberikan digunakan sesuai dengan seharusnya yakni untuk kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah desa harus dalam menjalankan semua program pemerintahan dengan berprinsip pada akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat yang akan berperan untuk mengawasi baik secara langsung ataupun melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana BPD menjadi sebuah badan yang berfungsi untuk mewakili aspirasi masyarakat desa.

Menurut data, anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Pusat pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 60 triliun, dengan realisasi dana desa mencapai Rp.

59,86 triliun atau 98,77%. Kemudian di tahun 2019, pemerintah menambah kembali anggaran sebanyak Rp. 70 triliun, dengan realisasi mencapai Rp. 42,2 triliun atau 60,29%, dan pada tahun 2020, Pemerintah Pusat menambah kembali dana desa sebanyak Rp. 72 triliun. Kemudian, dana desa diberikan kepada 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi atau kurang lebih sebanyak 74 ribu desa (Sukarno, 2023).

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh Ketut Novi, dkk (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan anggaran atau dana desa. Kemudian Umaira dan Adnan (2019) melakukan penelitian yang menunjukkan dimana partisipasi dari masyarakat dan pengawasan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selanjutnya, penelitian dari Matia Andriyani (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Imade Yoda, dkk (2019) bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan dana desa. Serta Roundhotu Jannati (2020) menguraikan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan dana desa memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap efektifitas pengelolaan dana desa.

Peran partisipasi masyarakat Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak relatif bervariasi, ada yang partisipasinya rendah, dan ada pula yang memiliki partisipasi tinggi. Sedangkan dalam hal keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pun masih sangat rendah. Salah satu faktornya adalah kurangnya pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi, komunikasi, serta kurang memberikan motivasi ataupun edukasi kepada masyarakat. Atas beberapa persoalan yang telah dijabarkan pada latar belakang ini, peneliti menarik benang merah penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa”** dengan objek penelitian di **Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menggunakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adakah partisipasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak?
2. Adakah pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, peneliti memberikan tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya partisipasi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.
2. Mengetahui adanya pengawasan masyarakat memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan sebuah wawasan baru dan menambah ilmu baru mengenai prinsip-prinsip partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak sehingga pengetahuan baru ini dapat diterapkan dalam rangka turut serta berkontribusi dalam pembangunan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Dengan adanya penelitian yang dilakukan diharapkan akan dapat menjadi pertimbangan ataupun bahan referensi untuk

mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak oleh perangkat desa sehingga akuntabilitasnya bisa meningkat. Hal ini mengingat bahwa pentingnya pengetahuan atau penelitian yang memberikan sebuah hasil realitas yang terjadi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

3. Bagi Almamater

Dengan adanya penelitian ini akan menjadi tambahan referensi untuk mahasiswa lainnya serta dapat dijadikan sebagai tambahan informasi serta pertimbangan dalam penelitian yang akan dilakukan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Penelitian pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat terkait pengertian partisipasi, pengawasan masyarakat, kerangka teori, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat terkait gambaran umum desa, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat terkait gambaran umum mengenai obyek yang diteliti dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir skripsi yang di dalamnya memuat terkait kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Dana Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang yang hidup di dunia kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Saling ketergantungan adalah apa yang menyebabkan orang hidup dalam komunitas dan secara keseluruhan. Masyarakat Desa adalah sekelompok orang atau individu yang tinggal di satu tempat dan terkait erat dengan tempat lain. Di setiap populasi negara tertentu, kemungkinan akan ada interaksi yang tidak terstruktur atau tidak alami.

Definisi desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo dalam bukunya yang berjudul “Desa” adalah suatu kesatuan hukum dimana suatu masyarakat bertempat tinggal dan yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutarjo, 1965). Adapun kata desa secara bahasa adalah “*deshi*” yang merupakan bahasa sansekerta berarti tanah tumpah darah atau tanah kelahiran. Adapun secara istilah, pengertian desa merupakan suatu wilayah yang letaknya jauh dari keramaian dan di dalamnya terdapat sebuah masyarakat yang menempati wilayah serta menjalankan aturan yang telah dibuat oleh masyarakat tersebut (Gunawan, 2007).

UU Desa No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah, berhak mengatur dan mengurus urusan negara dan kemanfaatan masyarakat atas prakarsa masyarakat, dengan diakui dan dihormatinya hak asal usul atau hak tradisional oleh pemerintah Indonesia.

Setelah adanya otonomi daerah, dalam pemakaiannya istilah desa bisa dengan menggunakan istilah yang berbeda sesuai adat

istiadat setempat. Salah satu contohnya desa di Sumatera Barat yang mana menggunakan istilah “*Nagari*”, di Papua dan Kutai Barat dengan istilah “*Kampung*”, serta di Aceh yang menggunakan istilah “*Gampong*”. Di Indonesia, berdasarkan Kepmendagri 050-145/2022, terdapat 8.506 kecamatan dan 74.961 desa yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Pembatasan kewenangan desa secara jelas tertuang dalam UU No. 6 tahun 2016 tidak serta merta memberikan kewenangan yang memungkinkan dipahami sebagai amanat, tetapi sebagai tanggung jawab juga harus dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan. ada juga alokasi dana desa tidak sedikit nilainya, tentunya pemerintah desa harus mampu mengelolanya dengan baik dan berdaya guna untuk melaksanakan pembangunan desa kesejahteraan masyarakat desa. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut harus ada bentuk organisasi birokrasi pemerintahan desa yang ideal.

Ada banyak pendapat atau interpretasi tentang spesifikasi birokrasi ideal menurut Weber. Weber berpendapat bahwa birokrasi adalah bentuk ideal dari organisasi atau birokrasi adalah tipe ideal organisasi dan birokrasi itu. Cita-cita ini memiliki beberapa ciri, yaitu: Pertama, ada pembagian kerja dan spesialisasi. Kedua, orientasi impersonal. Ketiga, ada hirarki otoritas di dalamnya. Keempat, regulasi dan pengaturan. Kelima, bimbingan karir, dan efisiensi. Keenam karakteristik ini merupakan rangkuman dari apa yang telah ada disorot oleh Weber sebagai fitur yang dapat dilakukan oleh birokrasi seharusnya menjadi tipe ideal organisasi, jika karakteristik ini bisa dilaksanakan, suatu organisasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan dapat bekerja secara maksimal untuk mendukung pemerintahan di suatu daerah (Mayuko, 2018).

Desa memiliki beberapa ciri yang berbeda dengan perkotaan, sedangkan ciri-ciri desa antara lain:

- a. Masyarakat Desa kehidupan dianggap sangat dekat dengan alam. Akibatnya, lapangan kerja terhomogenisasi dan terkonsentrasi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
- b. Kepadatan penduduk relatif rendah, rasio penduduk antar wilayah rendah, ditandai dengan prevalensi rumah di pedesaan dengan pekarangan yang tidak sejajar dengan tetangga.
- c. Tingkat interaksi masyarakat yang lebih intens merupakan tahap selanjutnya dari siklus desa. Selain itu, komunikasi harus bersifat pribadi agar kita terbuka dan membantu.
- d. Masyarakat Desa juga memiliki rasa persatuan yang kuat. Hal ini terjadi karena penduduk desa memiliki tujuan ekonomi, agama, dan keseharian yang sama. Dan;
- e. Masyarakat desa mobilitas juga cenderung rendah. Lapangan kerja terbatas dan ikatan masyarakat terlebih lagi membuat penduduk desa jarang bepergian atau pergi ke suatu tempat yang jauh.

2.1.1.2 Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai uang yang berasal dari APBN yang digunakan untuk Desa yang telah ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendukung inisiatif pemerintah termasuk proyek pembangunan, program penjangkauan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Pendapatan desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 terdiri dari pendapatan asli desa seperti: barang milik desa, swadaya masyarakat, pembagian pajak atau pembayaran dari kabupaten/kota pemerintah kota, dana

perimbangan dari pemerintah pusat, pendapatan daerah. Penyaluran dana kompensasi ke kas kabupaten atau desa, subsidi dari pemerintah kabupaten, subsidi dari pemerintah kabupaten, subsidi opsional dari pihak ketiga.

Desa mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan program pemerintahan yang dengan tujuan mempercepat dalam pertumbuhan maupun pembangunan. Sebagai imbalannya, pengurus desa memiliki sumber pendapatan untuk membiayai kegiatannya.

Keputusan Dewan Negara Nomor 43 Tahun 2015 menjelaskan dana desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerintah desa. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi dana desa disajikan kepada pemerintah diperuntukkan sebagai total biaya administrasi, pelaksanaan program, serta pengembangan atau pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau biasa disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Dewan Desa (Soemarwoto, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dipilih secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kecocokan geografis desa setiap kabupaten/kota. Mekanisme penyaluran Dana Desa dibagi menjadi dua (dua) tahap, yaitu tahap pengalihan APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap APBD dari RKUD ke kas desa.

Adapun mekanisme pengumpulan dan pemrosesan data Alokasi Dana Desa yang komprehensif adalah sebagai berikut:

- a. Pencairan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan presentasi saat ini yang telah direkam.

- b. Pembayaran pertama dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat Disertai dengan tingkat kompetensi administratif yang ditetapkan sebelumnya.
- c. Pencairan tahap demi tahap dapat dilaksanakan apabila pencairan pertama telah mendapat persetujuan administrasi, teknis, dan hukum.
- d. Pencairan dilakukan dengan mengirimkan uang dari bank daerah ke rekening kabupaten, baik yang pertama maupun yang kedua.
- e. Alokasi Dana Desa dari Kas Desa ke Peserta Kegiatan (pemimpin pelaksana kegiatan).

2.1.1.3 Tujuan Dana Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang semua pembahasan dana desa dimana semula disediakan untuk meningkatkan pembangunan desa terutama dilakukan dengan tujuan meningkatkan infrastruktur. Setelah target tercapai, alokasi dana desa akan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, penyempitan kesenjangan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya (Soemarwoto, 2018).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah bentuk komitmen negara untuk melindungi dan membuat desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan dimodifikasi. Dengan adanya Dana Desa, suatu desa dapat melaksanakan pembangunan dan pemeliharaannya untuk masyarakat yang adil, tenteram, dan terpencil. Selain itu, tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menghilangkan kemustahilan dan mengurangi kemekaran.
- b. Meningkatkan standar pembinaan masyarakat lokal dan pemberdayaan masyarakat lokal.

- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan berbasis keadilan lokal dan kearifan.
- d. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan sosial dan keagamaan yang memajukan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan tingkat bantuan kepada masyarakat setempat.
- f. Mendorong gotong royong masyarakat desa dan peningkatan keswadayaan keswadayaan.
- g. Meningkatkan kesejahteraan desa dan penduduknya melalui BUM Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh pemerintah daerah Sebanyak 30% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Biaya Operasional BPD, dan Tim Operasional Penyelenggara Alokasi Dana Desa. Sedangkan 70% dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan pembiayaan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUM Desa, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas. Sesuai dengan prinsip Dana Desa Bagian dari APBD, semua proyek yang dibiayai oleh Kelompok Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan dengan memperhatikan setiap lapisan penduduk Desa secara keseluruhan.

2.1.2 Partisipasi

2.1.2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah bagian atau peranan dan keterlibatan dalam keputusan tertentu. Mardiasmo mengatakan bahwa

partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dengan mengungkapkan keinginan untuk membuat atau mengambil keputusan. Bentuk partisipasi ini bisa langsung atau tidak langsung. Partisipasi didasarkan pada kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat (Mardiasmo, 2004).

Pengertian tentang partisipasi oleh banyak ahli biasanya diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan, yang bila dikaitkan dengan pembangunan maka akan merupakan upaya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Istilah lain partisipasi yang sering digunakan adalah peran serta, keterlibatan dan keikutsertaan yang terwujud di dalam sikap gotong-royong. Menurut Budiono (1999), gotong-royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama tanpa imbalan yang ditujukan untuk kepentingan bersama.

Dalam makna yang sama Widiyanti dan Sunindha (1989) mendefinisikannya sebagai suatu usaha yang diselenggarakan secara bersama yang dapat diwujudkan dalam pengertian partisipasi. Achmadi (1978) menambahkan bahwa partisipasi, masyarakat dalam bentuk swadaya gotong-royong merupakan modal utama. Sedangkan swadaya diartikannya sebagai kemampuan dari suatu kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan iktihar pemenuhan kebutuhan. Menurut Cohen dan Uphoff (Ndraha;1990) bahwa partisipasi dapat merupakan keluaran dan masukan pembangunan.

Partisipasi mengungkapkan adanya keikutsertaan individu atau kelompok dalam setiap usaha yang diberikan. Interupsi atau keterlibatan sesi dapat terjadi secara diam-diam dan tanpa interupsi. Meskipun demikian, keterlibatan secara tidak langsung mengacu pada situasi dimana seseorang tidak benar-benar terlibat dalam suatu kegiatan tertentu melainkan

memberikan sumbangan materi atau saran untuk kegiatan tersebut.

Adapun dalam sudut pandang agama Islam, partisipasi dijelaskan sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan luas, inisiatif, kreatif, sabar, dan sigap dalam menghadapi situasi apapun. Sebagaimana firman Allah SWT pada ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Mujadilah: Ayat 11 (Juz 28).

2.1.2.2 Tahap-tahap Partisipasi

Tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan partisipasi antara lain, yaitu:

- a. Tahapan Pengambilan Keputusan;
- b. Kegiatan Pelaksanaan;
- c. Kegiatan Pengambilan Manfaat;
- d. Proses Evaluasi (Solekhan, 2012).

2.1.2.3 Unsur-unsur Partisipasi Masyarakat

Setidaknya ada lima unsur penerapan partisipasi masyarakat, antara lain: a) Pertama, keikutsertaan maupun keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan. b) Kedua, timbulnya

kesadaran tanpa adanya paksaan. c) Ketiga, sikap pro aktif dari masyarakat. d) Keempat, kontribusi dari masyarakat baik berupa kontribusi fisik maupun kontribusi non fisik. Dan e) Kelima, diciptakannya kesepakatan-kesepakatan (Solekhan, 2012).

2.1.2.4 Manfaat Penerapan Partisipasi Masyarakat

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan partisipasi masyarakat adalah sebagai pengoreksi terhadap kebijakan-kebijakan termasuk didalamnya terdapat proses perencanaan dan pengalokasian. Hal ini menjadi suatu alat tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu program yang dijalankan, serta sebagai bahan evaluasi untuk merumuskan program-program dengan lebih baik lagi (Solekhan, 2012).

2.1.3 Pengawasan Dana

2.1.3.1 Pengertian Pengawasan Dana

Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan atau dianjurkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui pensucian dan pengorganisasian. Sangat penting untuk memahami berapa lama sebuah proyek telah berjalan, mengevaluasinya, dan mengidentifikasi masalah yang tersisa sehingga pertumbuhan proyek dapat dipercepat selama pelaksanaan. Akibatnya, pengawasan mengacu pada setiap kegiatan, dan setiap rencana untuk memahami dan menentukan apakah suatu tugas sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Jika ada proses yang membandingkan perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan dapat digambarkan sebagai fungsi manajemen. Alasannya, menurut Terry sebagaimana dikutip dalam Supriatna (1997) dan Panglaikim & Kansil (1960), masing-masing dari delapan fungsi manajemen Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling dilakukan sebagai

bagian dari suatu sistem manajemen yang komprehensif dan cermat. proses manajemen.

Nawawi (2003) menegaskan bahwa kontrol sosial, yang dikenal sebagai pengawasan masyarakat (Wasmaw dalam bahasa Indonesia), mengacu pada semua kritik, pertanyaan, dan komentar lain yang dibuat oleh anggota masyarakat umum mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi nirlaba di bawah arahan pemerintah dalam rangka memenuhi tugas yang diamanatkan konstitusi untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat untuk hidup damai dan bermartabat.

Sondang P Siagian (2005:125) menyampaikan pengertian bahwa pengendalian adalah suatu proses pengawasan terhadap segala kegiatan suatu organisasi, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Simbolon (2004:61) menjelaskan bahwa supervisi adalah suatu proses dimana seorang manajer memantau atau ingin mengetahui bagaimana pekerjaan bawahannya dilakukan sesuai dengan rencana, peraturan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 12 Permendes Tahun 2015 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah kabupaten berfungsi terhadap pengelolaan, pemantauan, pengawasan, dan pncevaluasian terhadap dana desa. Pemantauan merupakan serangkaian proses kegiatan dan pemantauan dengan tujuan memastikan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang digunakan pada sasaran.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu rangkaian penilaian terhadap kinerja kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan, dengan tujuan agar semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan.

Ada pengawasan, melakukan kesalahan bisa dievaluasi untuk diperbaiki nanti, tidak mengulangi pelanggaran lagi.

Penjelasan pengawasan menurut islam terdapat dalam Firman Allah SWT pada ayat berikut ini:

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُمْ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya: Aku tidak (pernah) mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang Engkau perintahkan kepadaku, (yaitu) “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.” Aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Engkau Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. QS. Al-Ma'idah: Ayat 117 (Juz 7)

2.1.3.2 Tujuan Pengawasan

Pengawasan merupakan upaya sistematis yang digunakan untuk menentukan kinerja terhadap standar perencanaan atau merancang sistem yang merespons dengan membandingkan kerja nyata sesuai ketentuan yang disepakati sebelumnya. Selain itu, pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan yang kemudian akan ditindaklanjuti sebagai tindakan korektif untuk memastikan bahwa sumber data pemerintahan difungsikan dengan seefisien dan seefektif mungkin untuk mewujudkan tujuan pemerintahan (Anggraeni, 2014).

Leonart White menyebutkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mempertahankan kekuasaan dengan mendapat dukungan serta persetujuan masyarakat dan untuk melindungi hak yang terdapat dalam undang-undang dari tindakan-tindakan penyelewengan. Sama halnya dengan Arifian Abdul Rachman,

ia menjelaskan tujuan monitoring adalah berfungsi untuk mengetahui apakah semua program dilakukan sesuai perencanaan yang telah digariskan dan untuk mengetahui kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaan untuk kemudian dievaluasi atau diambil tindakan.

Pengawasan dana desa oleh masyarakat memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menjamin agar tugas umum pemerintah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pengawas internal pemerintah untuk mencapai daya, hasil, dan tepat pemerintahan yang sesuai dan legal.
- b. Untuk memastikan bahwa konstruksi dilakukan sesuai dengan program perencanaan pemerintah dan kode bangunan yang berlaku sehingga dapat memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
- c. Agar hasil proyek pembangunan dapat dievaluasi secara memadai sehingga dapat digunakan untuk memberikan masukan terhadap pemerintahan umum dan tugas-tugas proyek pembangunan seperti pendapat, kesimpulan, pembinaan, dan saran.
- d. Sedapat mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kesalahan, dan penyimpangan dalam penggunaan kewenangan, tenaga, uang, dan sumber daya negara, serta memungkinkan pengerahan aparatur yang rapi, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya. guna.

2.1.3.3 Pedoman Pengawasan

Pengawasan merupakan jaminan dari serangkaian kegiatan program yang rumuskan telah sesuai seperti prosedur yang disahkan serta sudah dipergunakan dengan semestinya (Jannati,

2020). Menurut Simbolon, untuk melakukan pengawasan harus berpedoman pada hal-hal beriku ini:

- a. Menentukan rencana atau *planning*;
- b. Perintah terhadap pelaksanaan;
- c. Tujuan; dan
- d. Kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan.

2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.4.1 Pengertian Pengelolaan Dana

Pengertian pengelolaan dana desa merupakan tahapan atau rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa dilakukan sesuai peraturan pada Pasal 1 Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Pasal tersebut menyebutkan bahwa APBN menyalurkan dana untuk desa. Selain itu, pengelolaan dana desa juga diatur dalam UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003, UU Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004, UU No. 20 Tahun 2001, UU Pemerintah No. 31 Tahun 1999. Permendagri No. 43 Tahun 2014, serta Permendagri No. 113 Tahun 2014.

2.1.4.2 Asas-asas Pengelolaan Dana Desa

Pengertian mengenai asas pengelolaan dalam dana desa adalah suatu asas atau nilai yang berprinsip kepada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa asas pengelolaan dana, antara lain:

- a. Asas Transparan;
- b. Asas Akuntabel;
- c. Asas Partisipasi; serta
- d. Asas Tertib dan Disiplin.

2.1.4.3 Tahap-tahap Pengelolaan Dana Desa

- a. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaandana desa biasanya menyangkut beberapa persoalan, antara lain penyusunan

Raperdes APBDesa bersama kades dan BPD, penilaian oleh gubernur atau walikota oleh kalurahan pada akhir Oktober, APBDesa oleh gubernur atau paling lambat 20 hari untuk walikota dan 7 hari untuk kepala desa jika tidak dihitung. Dengan demikian, pemanfaatan dan prioritas desa ditentukan oleh BPD, Pemdes dan dinas sosial pada saat musyawarah desa.

Berdasarkan Permendagri No. 66 Tahun 2007 pasal 6, perencanaan penyelenggaraan desa disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 79 ayat 2, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) untuk jangka waktu 6 tahun. Dan (2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Dalam penggunaan Dana Desa, RPJM Desa dan RKP Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014).

RPJM Desa digunakan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa dan

menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Anggaran merupakan alat yang digunakan sebagai bentuk perencanaan bagaimana perkembangan desa dalam satu tahun kedepan. Menurut Bastian (2006), perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian dalam satu kesatuan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau realisasi dana desa yaitu pembayaran dan penerimaan dana desa melalui rekening yang dilarang oleh pemerintah desa, kecuali ditentukan lain oleh mufakat desa. Bendahara dapat menyimpan uang tunai di kas desa dan jumlahnya ditentukan atas kebijaksanaan gubernur atau walikota. Pembelian barang ataupun jasa diatur atas perintah bupati atau walikota.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa dengan melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas uang tersebut kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara Desa merupakan pihak yang melaksanakan penatausahaan di tingkat desa.

Penatausahaan desa dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Penatausahaan Pendapatan (Penerimaan), dalam penatausahaan penerimaan pendapatan desa, bendahara membuat dokumen yaitu buku kas umum, buku kas harian pembantu, dan buku kas pembantu perincian obyek penerimaan. Dan (2) Penatausahaan Belanja (Pengeluaran), dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Perdes tentang APB Desa atau Perdes tentang Perubahan APB Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP harus disetujui Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD).

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Kepala Desa berkewajiban: (1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. (2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota. (3) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Dan (4) Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan bukanlah penelitian pertama karena sebelumnya sudah ada penelitian-penelitian yang memiliki tema sama, seperti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Novi, dkk (2017) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Organisasi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For

Money hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan anggaran atau dana desa.

2. Kajian oleh Frisian J. Lolowang, dkk (2018) berjudul Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kayu Wisata Kecamatan Kawangkoan Barat. Dalam penelitian ini menggunakan metode survey yang dikaitkan dengan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dengan metode sampling, pengumpulan data dengan kuesioner, observasi dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS versi 20.0 dengan hasil pengawasan tersebut berdampak positif dan signifikan terhadap pengelolaan sumber daya desa di Desa Kayu Wisata Kecamatan Kawangkoan Barat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Umaira dan Adnan (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Tumuluntung Satu, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Matia Andriyani (2019) dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa Akuntabilitas, transparansi, partisipasi, berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Luk Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini merupakan penelitian Survei yang bersifat Asosiatif dengan pendekatan Kuantitatif. pengumpulan datanya menggunakan teknik sampling dengan pengambilan datanya menggunakan kuesioner, observasi, dan studi dokumen. sedangkan analisis datanya dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Imade Yoda, dkk (2019) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Tranparasi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abisemal Kabupaten Badung. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposeful

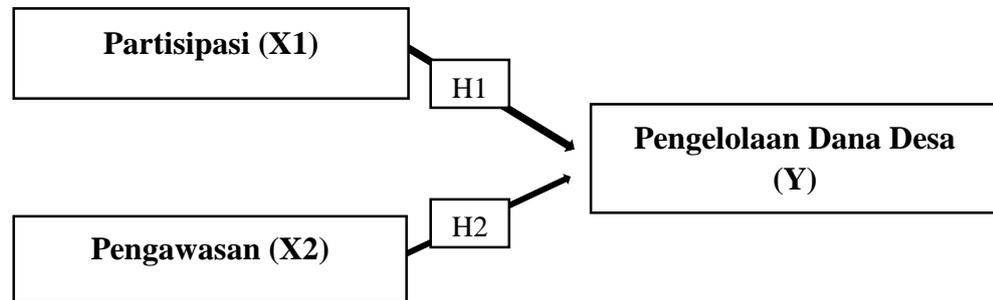
sampling, data dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berdampak positif terhadap efisiensi pengelolaan sumber daya di desa-desa di Kecamatan Abisemal Kabupaten Badung.

6. Penelitian oleh Fitri Sukmawati (2019) berjudul Dampak Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dimana pengumpulan data dilakukan melalui pertukaran dengan responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan uji validitas dan reliabilitas dengan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa di 30 pemerintah desa Kabupaten Garut.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Roundhotu Jannati (2020) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Sampel yang digunakan dalam penelitian merupakan masyarakat desa Krikilan dengan kualifikasi umur 17 keatas atau orang yang telah memiliki hak untuk memilih dengan sampel sebanyak 100 responden. Jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposeful sampling. Selanjutnya dilakukan pengecekan data menggunakan software SPSS versi 26. Hasil analisis data menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efisiensi pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah landasan teori yang mencakup perpaduan antara teori, fakta, observasi, dan kajian pustaka, yang nantinya menjadi dasar dalam penulisan artikel ilmiah. Sebagai landasan, kerangka kerja ini dibuat saat mempresentasikan konsep penelitian. Adapun erangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan awal untuk masalah penelitian sampai dibuktikan dengan data yang dikumpulkan. Dalam struktur penulisan ini, dimana penelitiannya menggunakan metode kuantitatif maka hipotesis menjadi poin yang sangat penting.

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka dan kerangka teori, maka hipotesis penelitian adalah:

2.4.1 Partisipasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Mardiasmo menuturkan bahwa partisipasi adalah adanya keterlibatan dari pihak masyarakat dengan menyuarakan aspirasi terhadap pembuatan atau pengambilan keputusan. Bentuk dari partisipasi ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dasar yang dibangun dalam partisipasi adalah atas dasar kebebasan bersosialisasi serta kebebasan berbicara (Mardiasmo, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Matia Andriyani (2019) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Dari uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

2.4.2 Pengawasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Pengertian pengawasan menurut Sondang P. Siagian (2015) adalah proses mengamati seluruh kegiatan organisasi dengan tujuan menjamin pekerjaan yang sedang dilakukan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Novi, dkk (2017) menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan anggaran atau dana desa. Dari uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengawasan Masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode yang didasarkan pada metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mensyaratkan penggunaan sejumlah data, interpretasi data, dan penampilan hasil dari data yang diolah. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme, dimana filsafat menekankan fenomena objektif yang dipelajari secara kuantitatif (Nugroho, 2015).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode kerja lapangan yang dilakukan dalam situasi kehidupan nyata. Subyek penelitian berada di Desa Brakas Kecamatan Dempet Bupati Demak. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek sumbernya. Peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner.

Responden yang dipilih mengisi data kuesioner yang telah dibuat dan diberikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini responden yang digunakan adalah warga Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun keatas. Kriteria ini dipilih untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan hasil penelitian yang dilakukan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah jumlah orang atau penduduk dengan karakteristik yang sama. Populasi penelitian disebut kelompok yang memenuhi persyaratan periode penelitian. Menurut Hadari Nawawi (1983), populasi adalah objek penelitian yang terdiri dari orang, hewan, benda, peristiwa, dan gejala yang menunjukkan ciri-ciri tertentu dalam penelitian yang dilakukan. Sedangkan Menurut Sugiyono (1997:57), populasi adalah objek yang memiliki karakteristik untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Populasi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, ataupun ukuran lainnya yang

dapat menjadi objek perhatian atau penelitian (Suharyadi, 2009). Populasi pada penelitian ini adalah Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang sudah berhak memilih atau berusia minimal 17 tahun.

3.2.2 Sampel

Definisi sampel menurut Sugiyono (2017:81) adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data penelitian, dimana populasi hanyalah sebagian kecil dari sejumlah karakteristik yang ada pada populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel menurut Sugiyono adalah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel mana yang akan digunakan.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang bisa dikatakan sebagai perwakilan dari populasi untuk mewakili keseluruhan populasi. Sampel ini bisa didapatkan melalui pengukuran statistik. Sampel Dalam penelitian ini merupakan masyarakat Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$
$$n = \frac{2.862}{1 + 2.862 (0,1)^2}$$
$$n = \frac{2.862}{1 + 28.62}$$
$$n = 96,6$$

Perhitungan menggunakan rumus slovin dengan standar error yaitu 10%. Standar error ditentukan atas banyaknya jumlah populasi yang diteliti. Dari perhitungan diatas diperoleh sampel sejumlah 97 responden. Jadi, pelaksanaan sampel dilakukan sebanyak 100 responden (n=100). Purpose Sampling yang digunakan dalam penelitian ini dengan memperhatikan kriteria responden yaitu pengelola keuangan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi,

Kepala Dusun, Kepala Urusan, Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), serta masyarakat Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak yang paham hukum dan memiliki hak pilih atau sudah berumur 17 tahun keatas.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini berfungsi untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti biasanya memiliki beberapa asumsi berdasarkan teori yang digunakannya, atau yang biasa disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, peneliti harus mengumpulkan data untuk pengujian lebih lanjut. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel hipotetik. Pengumpulan data didasarkan pada model yang diberikan. Informasi adalah sesuatu yang tidak memiliki arti bagi penerimanya namun perlu diproses. Informasi mengambil banyak bentuk seperti gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol dan bahkan situasi.

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer, yaitu peneliti mengumpulkan data secara langsung untuk memecahkan suatu persoalan tentang subjek penelitian. Pengumpulan menggunakan teknik penyebaran kuesioner dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian ini. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden beserta alternatif jawaban untuk memudahkan responden menjawab . Penelitian ini mengambil responden dari seluruh warga Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak yang memiliki pemahaman mengenai hukum dan sudah berumur 17 tahun ke atas. Survey ini dilakukan secara langsung untuk pengumpulan data kemudian diuji dengan uji validitas, uji reliabilitas dan uji analisis data.

3.4 Variable Penelitian dan Pengukuran

Pengertian dari variabel penelitian merupakan sebuah nilai atau ciri dari sesuatu yang akan diteliti baik individu atau kegiatan yang mempunyai keberagaman antara satu objek dengan objek lainnya. Skala adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pendek atau panjang suatu interval dalam suatu satuan pengukuran. Pengukuran penting untuk penelitian karena dengan

pengukuran, penelitian dapat menghubungkan konsep abstrak dengan kenyataan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran partisipasi dan pengawasan mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan variabel bebas partisipasi dan pengawasan. Sedangkan variabel terikat pada penelitian adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun perasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Variabel, Definisi, Indikator, dan Pengukuran

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Pengukuran
Partisipasi (X1)	Partisipasi merupakan sebuah proses keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik bentuknya secara langsung maupun tidak langsung. (Matia Andriyani (2019))	1. Keterlibatan masyarakat. 2. Pengambilan keputusan. 3. Proses evaluasi. (Matia Andriyani (2019))	Skala Likert.

<p>Pengawasan (X2)</p>	<p>Pengawasan diartikan sebagai serangkaian kegiatan apa yang dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan sesuai yang telah direncanakan.</p> <p>(Ketut Novi, dkk (2017))</p>	<p>1. Pengawasan program. 2. Kepastian Pelaksanaan. 3. Kesesuaian aturan.</p> <p>(Ketut Novi, dkk (2017))</p>	<p>Skala Likert.</p>
<p>Pengelolaan Dana (Y)</p>	<p>Pengelolaan sumber daya desa diartikan sebagai segala kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab keuangan desa.</p> <p>(Mada (2017))</p>	<p>1. Kejujuran. 2. Keterbukaan informasi. 3. Kepatuhan pelaporan.</p> <p>(Mada (2017))</p>	<p>Skala Likert.</p>

Skala Likert adalah salah satu bentuk skala yang dilakukan untuk mengumpulkan data demi mengetahui atau mengukur data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data tersebut diperoleh untuk mengetahui pendapat, persepsi, ataupun sikap seseorang terhadap sebuah fenomena yang terjadi. Instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert. Selanjutnya akan diberikan alternatif jawaban dari pertanyaan yang sudah disediakan, yaitu: STS atau Sangat Tidak Setuju memiliki nilai 1, TS atau Tidak Setuju memiliki nilai 2, N atau Netral memiliki nilai 3, S atau Setuju memiliki nilai 4, dan SS atau Sangat Setuju memiliki nilai 5.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai suatu kegiatan mengubah data atau informasi yang diperoleh menjadi informasi baru dengan tujuan supaya lebih mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi dari suatu masalah, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan software aplikasi SPSS 25.00. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang data agar informasi yang diperoleh mudah dipahami. Selain itu, respon yang diperoleh dari penelitian ini dihitung dengan menggunakan skala interval dengan menggunakan metode skala Likert. Data yang dihasilkan dari penelitian ini kemudian akan disajikan sebagai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, nilai maksimum, jumlah, rentang, dan lain sebagainya. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

3.5.1 Uji Validitas

Uji Validitas adalah tes yang dibuat untuk mengukur keakuratan dan kebenaran suatu variabel dalam kaitannya dengan fungsinya di riset. Nilai dalam penelitian adalah gelar keakuratan alat ukur terhadap objek yang diukur (Sugiaharto Sitinjak, 2006). Kemudian, Ghazali (2009) menyatakan bahwa ujian validitas menunjukkan apakah kuesioner tersebut valid atau tidak mempelajari.

Validitas diartikan sebagai ukuran kemampuan instrumen untuk merepresentasikan sesuatu yang diukur. Alat dianggap valid jika meteran

yang digunakan sesuai dengan yang diukur. (Sugiyono, 2010). Validitas adalah ukuran seberapa valid suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid jika digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen bernilai tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesamaan antara instrumen dan kriteria (Arikunto, 1999:65).

Saat memeriksa validitas survei, dapat dianggap valid jika pertanyaan dalam kuesioner dapat menunjukkan apa yang diukur dalam survei. Penelitian ini menggunakan uji signifikansi untuk membandingkan nilai r (korelasi dari jumlah item yang disesuaikan dengan output alpha Cronbach). Dimana hal tersebut sesuai dengan perhitungan korelasi bivariat berdasarkan variabel keputusan r lebih besar dari r tabel.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas meliputi pengecekan konsistensi alat ukur, apakah hasilnya konsisten atau tidak jika pengukuran dilakukan berulang-ulang. Uji reliabilitas diartikan sebagai suatu pengukuran data yang memiliki tujuan untuk kestabilan dan konsistensi dari responden dalam menjawab pertanyaan berupa kuesioner (Manajemen, 2007). Kuesioner dapat dikatakan reliable jika jawaban dari responden adalah konsisten. Uji reliabilitas diperlukan untuk mengukur pertanyaan dengan indikator variabel. Perhitungan dalam pengujian ini adalah koefisien Cronbach's Alpha dengan menggunakan SPSS dimana suatu variabel disebut fungsi jika memiliki Cronbach's Alpha $> 0,60$ sehingga Cronbach's Alpha setiap variabel memiliki nilai $> 0,60$.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas didefinisikan sebagai perhitungan data dengan tujuan menguji atau memperkirakan distribusi data suatu variabel. Selain itu, uji normalitas juga dipakai buat menerima data menurut populasi normal. Uji T & F mengasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal.

Dalam penelitian ini penggunaan uji normalitas adalah melalui analisis grafik, dimana normalitas dapat dilihat dari sebaran data pada sumbu diagonal histogram atau dengan melihat histogram plot residual. Jika data terdistribusi di sekitar diagonal dan sepanjang diagonal atau histogram, hasilnya menunjukkan distribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data atau grafik memanjang melintasi diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau histogram, hasilnya tidak menunjukkan distribusi normal, sehingga model regresi gagal memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2018).

3.5.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah perhitungan data yang tujuannya untuk memeriksa apakah ada korelasi timbal balik atau kolinearitas antara variabel independen dalam data. Interkorelasi didefinisikan sebagai hubungan yang erat antar variabel independen atau prediktor dengan prediktor lain dalam model regresi.

Uji multikolinieritas digunakan untuk menentukan adanya korelasi antara variabel bebas (IV) dalam model regresi. Dalam uji multikolonieritas, korelasi antar variabel bebas (IV) harus kecil. Pada uji multikolonieritas, deteksi dapat dilakukan berdasarkan nilai tolerance dan VIF. Semakin kecil nilai tolerance dan semakin besar VIF maka semakin mendekati multikolonieritas (Nisfiannoor, 2009).

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah perhitungan data yang digunakan untuk mengevaluasi adanya perbedaan varians antar objek pengamatan dalam regresi linier. Uji ini harus dimasukkan dalam uji hipotesis klasik karena jika varian variabel tidak terpenuhi, regresi dianggap tidak valid. Tes ini dapat dilakukan dengan menggunakan scatter plot antara

variabel dependen ZPRED dan SRESID. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode Glejser. Uji Glejser digunakan untuk melihat jika tingkat kepercayaan lebih besar dari 5% maka model regresi tidak mengandung varians variabel (Ghozali, 2013).

3.5.4 Analisis Regresi

Pada akhir 1800-an, Sir Francis Galton pertama kali memperkenalkan analisis regresi dengan mempelajari hubungan antara tinggi badan ayah dan tinggi badan anak laki-laki. Konsep dasar regresi adalah semua tentang kondisi awal untuk mengukur hubungan antara variabel dependen dan independen serta menunjukkan arah kedua variabel tersebut (Wibisono, 2013). Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan analisis regresi ini adalah:

3.5.4.1 Analisa Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah uji regresi dimana jumlah variabel bebas terdiri dari lebih dari satu variabel terikat atau variabel terikat (Y) dikaitkan dengan lebih dari satu variabel bebas (X), dengan ketentuan uji regresi linier berganda merupakan variabel bebas tidak berdiri sendiri, tetapi mengikuti tes lain yang saling mendukung dan terkait (Rianto, 2020). Rumus analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

a : Konstanta

β : Koefisien Regresi

E : *Error Estimated*

Y : Pengelolaan Dana Desa

X_1 : Partisipasi Masyarakat

X_2 : Pengawasan Masyarakat

X_3 : Peran Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat

3.5.4.2 Koefisien Determinan (R²)

Menurut Imam Ghozali (2016), uji R² pada dasarnya mengukur kemampuan model memperhitungkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien korelasi penentu adalah nol dan satu. Koefisien determinasi merupakan ukuran yang menguji seberapa kuat kemampuan semua variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat, dengan semakin tinggi nilai R² maka semakin baik cerminannya semakin tinggi pula persentase. dari nilai variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent). Hal tersebut tidak menambah kelengkapan model dalam penelitian karena didasarkan pada penambahan variabel. Semakin banyak variabel independen, semakin tinggi koefisien determinasinya (Ghozali, 2013).

3.5.4.3 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan (uji-F statistik) adalah teknik yang digunakan untuk menguji semua hubungan secara bersamaan variabel independen terhadap variabel dependen. Ada dua jenis perhitungan dalam perhitungan uji F-statistik, yaitu uji-F dengan perbandingan uji F-tabel dan uji-F aritmatika, di mana F-tabel diperoleh derajat F-tabel dan alfa. Perhitungan uji F kedua menggunakan nilai F dan nilai signifikansi 5% (Seran, 2020).

3.5.4.4 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji signifikansi parameter individu (uji t-statistik) adalah uji komputer yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (variabel bebas) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (variabel terikat). Hasil perhitungan ini dari jumlah derajat kebebasan dengan kepastian 5%. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005 maka hipotesis penelitian ditolak. Selain itu, uji signifikansi masing-masing parameter juga dapat

dilakukan dengan membandingkan t-statistik yang dihitung dengan t-score pada tabel (Seran, 2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum dan Sejarah Desa Brakas

Desa Brakas merupakan salah satu desa di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Letak geografis wilayah desa brakas berbatasan dengan wilayah kabupaten Grobogan di sebelah timur, di sebelah barat berbatasan dengan wilayah desa Kunir, di sebelah utara berbatasan dengan wilayah desa Balerejo dan di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa Karangrejo, dimana tiga desa juga masuk dalam wilayah Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

Desa Brakas memiliki luas 293 Ha. dengan Sawah irigasi Teknis 63 Ha, dan Tadah hujan 195 Ha. dengan jumlah penduduk 3015 jiwa dengan 854 kepala keluarga ini tergolong sebagai desa yang maju. Akses jalan menuju desa ini sangat mudah karena desa ini terletak di jalan alternatif Purwodadi-jalur pantura Demak (kecamatan Karanganyar). Tata letak desa Brakas ini sangat teratur. Desa Brakas terdiri dari 3 RW atau Rukun Warga dan 15 RT atau Rukun Tetangga. Desa Brakas tidak terdiri dari beberapa dukuh, akan tetapi terdapat 15 gang dimana setiap gang memiliki satu musholla, serta satu masjid terdapat di pinggir jalan raya di antara gang 5 dengan gang 6.

Desa Brakas memiliki jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1542 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1473 jiwa. Desa Brakas merupakan desa agraris yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Padi, cabai, dan kacang ditanam. Sistem pengairan desa sangat baik karena dua sungai mengalir di sisi timur desa. Sungai itu merupakan sumber irigasi bagi pertanian rakyat. Selain itu, pengelolaan irigasi di Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sudah sistematis.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pemerintahan desa di setiap desa merupakan kepanjangan dari negara, berperan dalam mengatur masyarakat desa atau memiliki strategi pelaksanaan manajemen pembangunan. Berangkat dari peran tersebut lahirlah Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa agar aparatur pemerintahan dapat bekerja secara optimal. Susunan pemerintahan desa terbaru ini dibuat dengan dibarengi pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan pada Pasal 62 dan 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014 dilaksanakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 mengubah peraturan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa.

Kepala desa adalah ketua badan desa yang membawahi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekretariat Desa Sekretaris Desa dan didukung oleh staf sekretariat. Sekretariat Desa terdiri dari paling banyak 3 (tiga) kaur, yaitu: urusan administrasi dan umum, urusan keuangan dan perencanaan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan dan keuangan. Setiap perusahaan dipimpin oleh seorang manajer kasus. Sekretaris desa berfungsi sebagai bagian dari administrasi kesekretariatan desa. Tugas sekretaris desa adalah mendukung kepala desa dalam bidang penyelenggaraan negara. Kepala Urusan (Kaur) bekerja sebagai pegawai sekretariat. Pelaksana teknis adalah pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kontraktor Teknis terdiri dari maksimal 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintah, seksi sosial dan seksi pelayanan. Sekurang-kurangnya 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pemerintahan dan Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi (kasi). Kepala seksi bertindak sebagai elemen implementasi teknis.

Pemerintahan Desa Brakas memerlukan kerjasama antar pegawai dalam melaksanakan tugas kenegaraan, masing-masing memiliki tugas sesuai dengan fungsinya. Koordinasi antar karyawan diperlukan karena kekompakan dan kerja sama ini mencerminkan kegiatan khusus yang mencakup bagian-bagian dari setiap sub divisi. Semakin banyak koordinasi yang terjadi, semakin kompleks pula hubungan antar pegawai, sehingga setiap pegawai memahami terkait tugas dan tanggung jawabnya. Mengenai struktur organisasi Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Desa Brakas

No	Nama	Jabatan
1	Samsul Huda, S.E	Kepala Desa
2	Wahyu Noviyanto, S.H	Sekretaris Desa
3	Muhammad Yusuf	Kepala Urusan Keuangan
4	Rifa'i	Kepala Urusan Perencanaan
5	Kasmadi	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
6	Muttasiudin, S.Pd	Kasi Pelayanan
7	Sobirin, S.H	Kasi Pemerintahan
8	Aksanudin. S.Pd.I	Kasi Kesejahteraan
9	Habib Abdullah	Staf Pelayanan
10	Mustaghfirin	Kepala Dusun
11	Abdul Latif	Kepala Dusun

Sumber: Pemerintah Desa Brakas (2023)

4.1.3 Deskriptif Data Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner. Distribusi dilakukan secara langsung terhadap responden yang memenuhi kriteria, yaitu mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau telah memiliki hak pilih dan cukup umur di Desa Brakas. Pendataan ini diperoleh dengan berkeliling desa Brakas untuk mendapatkan informasi dari setiap RW sehingga pendataan dapat lebih maksimal. Desa Brakas kecamatan Dempet kabupaten Demak memiliki 15 RT dan 3 RW dimana setiap RW terdapat 5 RT dimana kuesioner ini disebar rata pada masing-masing RT.

Selain itu, kuesioner juga dibagikan kepada perangkat desa Brakas antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Rukun Tetangga (RT) serta Ketua Rukun Warga (RW). Pada saat penyebaran angket ini, peneliti melampirkan angket alternatif jawaban yang diisi oleh responden dengan menandai pilihan dari 12 alternatif jawaban tersebut. Hal ini untuk memudahkan responden dalam mengisi survei. Penyebaran survei ini dilakukan antara tanggal 1 Februari sampai dengan 20 Februari 2023 dengan sampel sebanyak 100 orang atau responden.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden adalah informasi yang diperoleh dari responden berupa kuesioner yang disebar oleh penulis, yang meliputi jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan masyarakat beserta pekerjaannya.

4.2.1 Usia Responden

Usia adalah derajat kematangan mental seseorang untuk mengambil keputusan tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Dalam proses penyebaran kuesioner pada penelitian ini, diperoleh 100 responden dengan jumlah persentase usia sebagai berikut:

Tabel 4.2
Persentase Usia Responden

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	17 – 30	54	54%
2	31 – 40	20	20%
3	41 – 50	16	16%
4	51 – 60	8	8%
5	> 60	2	2%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer.

Dari hasil data persentase usia responden diatas, dapat disimpulkan bahwa data penyebaran usia responden mulai dari 17 – 30 tahun sebanyak 54 responden, 31 – 40 tahun sebanyak 20 responden, 41 – 50 tahun sebanyak 16 responden, 51 – 60 tahun sebanyak 8 responden, dan lebih dari 60 tahun sebanyak 2 responden.

4.2.2 Jenis Kelamin

Berdasarkan keseluruhan dari jumlah laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Persentase Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	42	42%
2	Perempuan	58	58%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer.

Dari data persentase jenis kelamin responden diatas, dapat disimpulkan bahwa responden perempuan mendominasi penyebaran kusioner ini dengan rincian responden laki-laki berjumlah 42 responden dan responden perempuan berjumlah 58 responden.

4.2.3 Pekerjaan

Dalam proses distribusi kusioner pada penelitian ini, diperoleh 100 responden dengan jumlah persentase pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Persentase Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	42	42%
2	Pelajar	15	15%
3	Mahasiswa	6	6%
4	Ibu Rumah Tangga	15	15%
5	Wiraswasta	11	11%
6	Guru	8	8%
7	PNS	3	3%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer.

Terlihat dari data proporsi pekerjaan responden di atas bahwa penyebaran data kusioner ini sebagian besar berbasis pertanian dengan rincian petani berjumlah 42 responden, pelajar 15 responden, mahasiswa 6 responden, ibu rumah tangga 15 responden, wiraswasta 11 responden, guru 8 responden, dan PNS 3 responden.

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden di masyarakat Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Variabel data dalam penelitian ini adalah variabel bebas meliputi partisipasi masyarakat, pengawasan, dan partisipasi dan pengawasan, sedangkan variabel terikat meliputi tanggung jawab pengelolaan dana desa. Berikut data dari hasil survei tersebut:

Tabel 4.5
Data Hasil Kuesioner

Item Pertanyaan	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
	STS		TS		N		S		SS	
X1.1	0	0%	8	8%	4	4%	67	67%	21	21%
X1.2	0	0%	8	8%	7	7%	50	50%	35	35%
X1.3	3	3%	4	4%	8	8%	50	50%	35	35%
X2.1	0	0%	6	6%	2	2%	61	61%	31	31%
X2.2	0	0%	9	9%	3	3%	42	42%	46	42%
X2.3	1	0%	3	3%	9	9%	50	50%	37	37%
Y1	0	0%	5	5%	10	10%	45	45%	40	40%
Y2	0	0%	3	3%	5	5%	37	37%	55	55%
Y3	0	0%	2	2%	8	8%	36	36%	54	54%

Sumber: Data Primer (diolah), 2023.

4.3.1 Kualitas Partisipasi

Dari tabel variabel partisipasi pada bagian X1.1 terlihat bahwa 8% responden tidak setuju, 4% responden netral, 67% responden tidak setuju dan 21% responden tidak setuju tidak setuju masyarakat Brakas selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Dari tabel variabel yang berpartisipasi dari bagian X1.2 terlihat bahwa 8% responden tidak setuju, 7% netral, 50% setuju dan 35% sangat setuju bahwa masyarakat desa Brakas selalu terlibat dalam pengelolaan dana desa. Memutuskan.

Dari tabel variabel partisipasi pada bagian X1.3 terlihat bahwa 3% responden sangat tidak setuju, 4% sangat tidak setuju, 8% netral, 50% setuju dan 35% sangat setuju masyarakat Desa Brakas selalu dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan program dana desa.

4.3.2 Kualitas Pengawasan

Dari tabel variabel untuk item X2.1, terlihat 6% responden menyatakan tidak setuju, 2% menyatakan netral, 61% setuju dan 31% menyatakan sangat setuju. program pengelolaan dana.

Dari tabel variabel kontrol butir X2.2 terlihat bahwa 9% responden menyatakan tidak setuju, 3% menyatakan netral, 42% setuju dan 46% menyatakan sangat setuju desa Brakas dipercaya masyarakat. bahwa pelaksanaan program dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari tabel variabel kontrol pada bagian X2.3 terlihat bahwa 1% responden sangat tidak setuju, 3% tidak setuju, 9% netral, 50% setuju dan 37% tanggapan sangat kuat. setuju bahwa masyarakat desa Brakas merasa bahwa program desa sponsor dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

4.3.3 Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan variabel partisipasi dan pemantauan di bagian Y.1, kami menemukan bahwa 5% responden menyatakan tidak setuju, 10% mengatakan netral, 45% setuju, dan 40% menyatakan sangat setuju

bahwa masyarakat Desa Brakas percaya bahwa pengelola dana desa memiliki prinsip kejujuran dalam pelaksanaan programnya.

Berdasarkan variabel partisipasi dan pemantauan pada item Y.2, terlihat bahwa 3% responden menyatakan tidak setuju, 5% menyatakan netral, 37% setuju dan 55% menyatakan sangat setuju. informasi sehingga akses dokumen publik laporan alokasi dana desa mudah diperoleh.

Dari tabel variabel partisipasi dan pemantauan pada bagian Y.3 terlihat bahwa 2% responden menyatakan tidak setuju, 8% menyatakan netral, 36% setuju dan 54% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat Desa Brakas merasa Pelaksanaan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa sudah berjalan dengan baik.

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.4.1 Uji Validitas

Pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan seberapa efektif alat ukur yang digunakan dalam pengukuran terhadap apa yang diukur menggunakan uji validitas. Menurut Ghazali (2009) uji validitas digunakan untuk mengukur validitas atau validitas suatu kuesioner. Pengecekan validitas dilakukan dengan menggunakan key check yang membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Apabila nilai r hitung > r tabel dan bernilai positif. Besarnya degree of freedom (df) = n - 2 dimana n merupakan jumlah dari sampel pada kasus ini. Sehingga df = 100 - 2 = 98 atau df 98 dengan alpha 0,05% maka didapat r tabel 0,165.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas Item Kuesioner Pada Pernyataan
Mengenai Partisipasi (X1)

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
P1	0,807	0,165	<i>Valid</i>
P2	0,867	0,165	<i>Valid</i>
P3	0,849	0,165	<i>Valid</i>

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS, 2023.

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa semua entri dalam deklarasi variabel Join (X1) dianggap valid. Hal ini terlihat dari hitung $r >$ dari tabel r (0,165) sehingga diperlukan validitas elemen deklarasi variabel Partisipasi dapat dipenuhi.

Tabel 4.7

Hasil Pengujian Validitas Item Kuesioner Pada Pernyataan Mengenai Pengawasan (X2)

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
P1	0,773	0,165	<i>Valid</i>
P2	0,848	0,165	<i>Valid</i>
P3	0,808	0,165	<i>Valid</i>

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS, 2023.

Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh komponen pernyataan variabel supervisor (X2) dikatakan valid bila dilihat dari r hitung $>$ dari tabel r (0,165) dapat dipenuhi.

Tabel 4.8

Hasil Pengujian Validitas Item Kuesioner Pada Pernyataan Mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
P1	0,815	0,165	<i>Valid</i>
P2	0,802	0,165	<i>Valid</i>
P3	0,782	0,165	<i>Valid</i>

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS, 2023.

Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua faktor yang dilaporkan untuk variabel Akuntabilitas Pengelola Dana Desa (Y) dianggap valid bila dilihat dari r hitung $>$ dari r tabel (0,165)) sehingga klaim validitas dapat dipenuhi.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat digunakan untuk menentukan konsistensi tanggapan yang diterima. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika respondennya memberikan jawaban yang koheren untuk pernyataan dan dari umumnya stabil dari waktu ke waktu. Keandalan pernyataan dapat dikenal dengan nilai Cronbach Alpha-nya, yang merupakan alat penelitian dianggap reliabel ketika Cronbach Alpha $> 0,60$. Jika nilai Cronbach Alfa $< 0,60$, tidak bisa disebut reliabel.

Tabel 4.9
Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Reliabilitas Coeficient	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	3 Pertanyaan	0,791	Reliabel
X2	3 Pertanyaan	0,737	Reliabel
Y	3 Pertanyaan	0,717	Reliabel

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS, 2023.

Dari hasil uji reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan variabel cronbach alpha lebih dari 0,60 sehingga semua variabel, yaitu (X1), (X2), dan (Y) dianggap reliabel.

4.5 Uji Asumsi Klasik

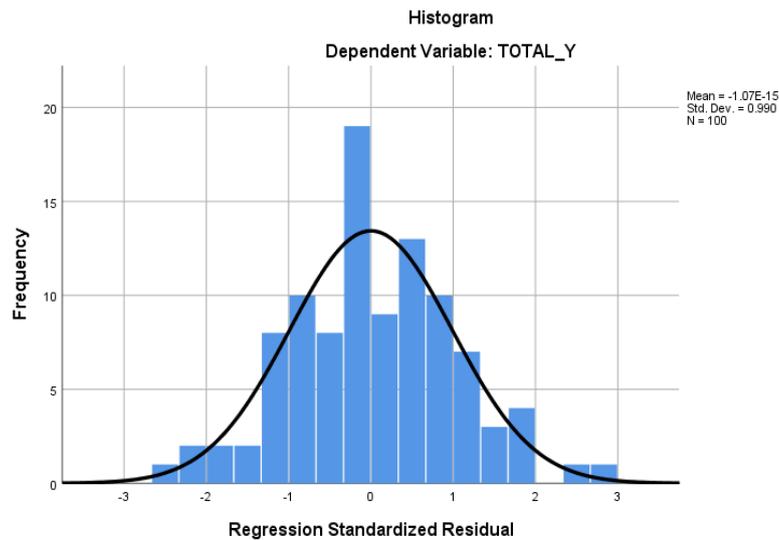
4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang menilai sebaran data dalam suatu kumpulan data atau variabel, apakah sebaran data tersebut mengikuti sebaran normal atau tidak. Uji normalitas dapat digunakan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul mengikuti atau berasal dari suatu distribusi normal.

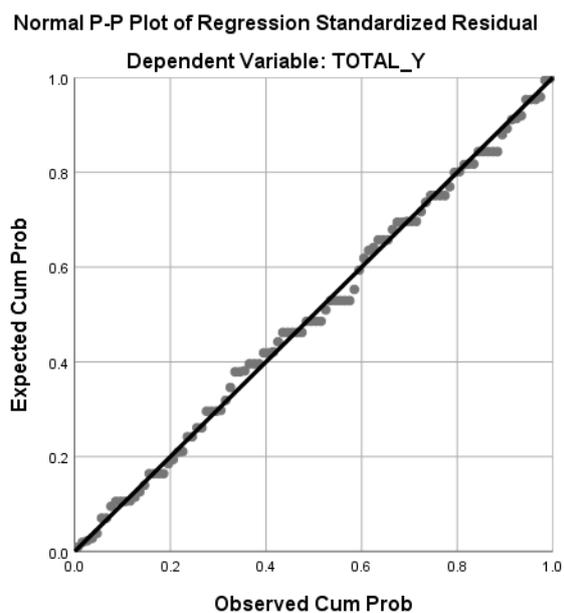
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel bebas dalam model regresi semuanya mengikuti distribusi normal. Salah satu cara untuk melihat kenormalan adalah dengan menggunakan Kolmogrov Smirnov tes. Uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram yaitu data yang diamati dapat dibandingkan dengan distribusi yang mendekati normal. Lihat plot probabilitas normal

yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Ketika distribusi data residual normal, garis yang menggambarkan data sebenarnya mengikuti garis diagonal.

Gambar 4.1
Grafik Histogram Uji Normalitas



Gambar 4.2
Uji Plot Gambar Normalitas



Dari pengujian pada Gambar 4.1 dan 4.2 di atas terlihat bahwa distribusinya normal. Pada Gambar 4.1, residual histogram untuk hasil pengujian normal menunjukkan kurva normal yang membentuk lonceng. Sedangkan pada Gambar 4.2 diagram P-P terlihat bahwa titik-titik tersebar pada garis diagonal dan distribusinya mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, data yang digunakan memenuhi asumsi klasik dan dapat dikatakan berdistribusi normal.

4.5.2 Analisis Statistik

Analisis statistik merupakan proses pengolahan data yang didalamnya terdapat proses mulai dari penyaringan, pembersihan, transformasi, pengolahan hingga pemodelan data. Tujuannya adalah untuk menemukan informasi yang berguna yang menjadi dasar kesimpulan atau keputusan.

Proses tersebut menerapkan metode atau teknik statistik pada data yang dimilikinya. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov (K-S) untuk mengetahui apakah sebaran data normal dengan melihat perbandingan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas K-S

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.28008200
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.051
	Negative	-.048
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS, 2023.

Berdasarkan pengujian di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,20. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga dapat menjadi data terdistribusi secara normal.

4.5.3 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah hal tersebut terjadi atau tidak hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dalam suatu model regresi Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel bebas. Uji multikolonieritas menguji apakah model regresi menemukan korelasi antara variabel independen dan mendeteksi apakah model regresi menunjukkan multikolonieritas yang tercermin dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan seberapa banyak masing-masing variabel independen dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Jika nilai toleransi $> 0,1$ dan nilai VIF $<$; maka regresi tersebut dikatakan multikolinier 10. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh hasil uji multikolonieritas sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficient ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PARTISIPASI	.347	2.878
	PENGAWASAN	.347	2.878
a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA			

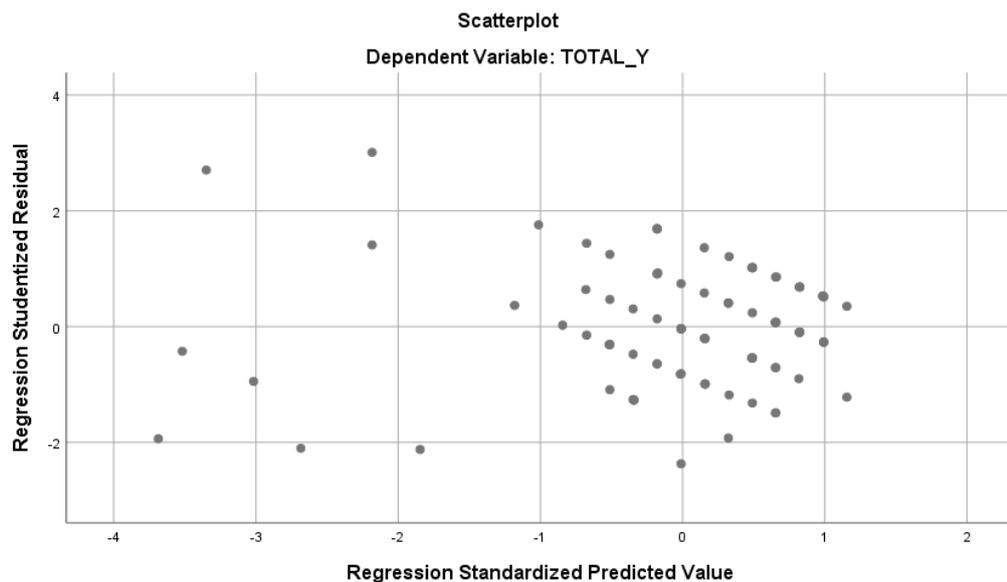
Sumber: Data Primer (diolah) SPSS, 2023.

Dari hasil uji melalui Variance Inflation Factor (VIF), menghasilkan variabel Partisipasi 0,347 dan Pengawasan 0,347 memiliki nilai tolerance $> 0,1$ atau nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF < 10 atau lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda bebas dari multikolinearitas.

4.5.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang membuat model regresi linier sederhana menjadi tidak efektif dan tidak akurat, yang juga menyebabkan kesalahan dalam penggunaan metode maximum likelihood dalam pendugaan parameter (koefisien) regresi. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketimpangan varians pada model regresi dengan melihat dispersinya. Jika hasil scatterplot menunjukkan titik-titik data terdistribusi dan tidak membentuk pola gelombang, atau mengelompok pada satu titik saja, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

Gambar 4.3
Scatterplot



Gambaran scatter plot di atas menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar, tidak membentuk gelombang, atau hanya mengelompok pada satu titik, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas yang berarti data loyalitas konsumen berdistribusi normal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa uji normalitas dilakukan dengan menggunakan histogram dan diagram pencar, dapat disimpulkan bahwa kedua uji normalitas ini berdistribusi normal, data ditampilkan dan terlihat melalui gambar atau grafik.

4.5.5 Analisis Regresi Linier

Regresi linier adalah metode analisis data yang menggunakan nilai data lain yang diketahui dan terkait untuk memprediksi nilai data yang tidak diketahui. Pemodelan matematika dari variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linier.

Analisis regresi adalah analisis yang mengukur variabel dependen sebagai variabel independen meningkat atau menurun. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi, supervisi, dan partisipasi, supervisi sebagai variabel independen (berkorelasi) dan akuntabilitas sebagai variabel dependen (independen).) tentang pengelolaan dana di tingkat desa.

Tabel 4.12
Hasil Uji Analisis Regresi Linier

Model		Coefficient ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.056	.849		5.954	.000
	PARTISIPASI	.430	.103	.505	4.170	.000
	PENGAWASAN	.128	.112	.273	1.953	.054
a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA						

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS, 2023.

Dari tabel diatas dapat hasil analisis regresi berganda untuk variabel partisipasi sebesar 0,430 dan variabel pengawasan sebesar 0,128. Sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e.$$

$$Y = 5.056 + 0.430X_1 + 0.128X_2 + e$$

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 5.056. Tanda positif berarti menunjukkan pengaruh satu arah antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi partisipasi (X1) dan pengawasan (X2) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah 5.056.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel partisipasi (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,430. Hal ini menunjukkan jika partisipasi masyarakat dinaikkan sebesar 1% maka skala linkert dalam hal ini indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa akan naik sebesar 0,430. Tanda positif berarti menunjukkan pengaruh satu arah antara variabel bebas dan variabel terikat.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengawasan (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,128. Hal ini menunjukkan jika pengawasan masyarakat dinaikkan sebesar 1% maka skala linkert dalam hal ini indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa akan naik sebesar 0,157. Tanda positif berarti menunjukkan pengaruh satu arah antara variabel bebas dan variabel terikat.

4.5.6 Uji Koefisien Determinan

R-squared juga dikenal sebagai koefisien determinasi yang menggambarkan sejauh mana data dependen dapat dijelaskan oleh data independen. Nilai R-squared berkisar antara 0 sampai dengan 1, dengan syarat semakin mendekati angka satu maka semakin baik. Tujuan

pengujian koefisien determinasi adalah untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan seberapa kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan (simultan), yang dapat dinyatakan dengan nilai adjusted R-squared. Koefisien determinasi (R^2) merupakan pengujian untuk menjelaskan seberapa besar kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen dianggap R Square.

Tabel 4.13
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.711 ^a	.505	.495	1.29321
a. Predictors: (Constant), PARTISIPASI, PENGAWASAN,				
b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA				

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS, 2023.

Berdasarkan perhitungan SPSS di atas, nilai koefisien determinasi terkoreksi dari hasil determinasi di atas adalah 50,8%, artinya masih ada variabel independen lain selain variabel independen yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa.

4.5.7 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji F secara simultan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. ANOVA statistik adalah suatu bentuk pengujian hipotesis yang menarik kesimpulan dari data atau kelompok statistik yang diperoleh. Keputusan untuk pengujian ini diambil dengan meninjau nilai F yang terdapat pada tabel ANOVA, dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05.

Tujuan dari uji F-statistik adalah untuk menunjukkan bagaimana semua variabel independen yang termasuk dalam desain penelitian ini secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji F-statistik

menunjukkan efek gabungan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F-statistik pada penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14
Uji Statistik (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165.418	2	82.709	49.455	.000 ^b
	Residual	162.222	97	1.627		
	Total	327.640	99			
c. Predictors: (Constant), PARTISIPASI, PENGAWASAN						
d. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA						

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS, 2023.

Dari tabel ANOVA atau uji F diatas terlihat nilai F sebesar 49,455 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini jauh lebih tinggi dari nilai pada Tabel 2.31, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tanggung jawab akuntabilitas pengelolaan dana di tingkat desa yaitu dampak partisipasi dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana di desa.

4.5.8 Uji Parsial (Uji Statistik T)

Tes parsial digunakan untuk menguji dan mengkonfirmasi hipotesis independen. Beberapa tes ditandai dengan. Tes ini digunakan di menggunakan regresi untuk menentukan apakah variabel independen tertentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Asumsinya adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi menunjukkan $> 0,05$ (α), maka variabel independen secara individual tidak ada pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi menunjukkan $< 0,05$ (α), maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel Coefficientss^a.

Tabel 4.15
Uji Parsial (Uji T)

Coefficient ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.056	.849		5.954	.000
	PARTISIPASI	.430	.103	.505	4.170	.000
	PENGAWASAN	.128	.112	.273	1.953	.054
b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA						

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS, 2023.

Dari hasil analisis tabel koefisien di atas terlihat bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial adalah sebagai berikut:

- a. Variabel kualitas partisipasi memiliki nilai yang signifikan dibawah 0,05 oleh karena itu partisipasi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Variabel kualitas pengawasan memiliki nilai tidak signifikan diatas 0,05 oleh karena itu pengawasan secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan dana desa.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Partisipasi (X1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) di Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan uji hipotesis diatas, menunjukkan bahwa variabel partisipasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Brakas kecamatan Dempet kabupaten Demak. Uji hipotesis menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ artinya nilai signifikan tersebut dapat diterima karena tidak lebih dari 0,05.

Dari ulasan di atas, temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan isu penting dalam pengelolaan sumber daya desa. Ini melayani tujuan Dana Desa, yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dapat digunakan untuk mempersiapkan masyarakat untuk lebih banyak tindakan swadaya. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber pembiayaan desa berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jawaban “setuju” dan “sangat setuju” terhadap kuesioner tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian I Made Yoda dan Ni Ketut Rasmini (2019) yang menunjukkan bahwa variabel transparansi berdampak positif terhadap pengelolaan dana desa, dan dengan penelitian Fitri Sukmawati (2019). Variabel transparansi tidak berdampak positif terhadap operasional pengelolaan dana desa.

4.6.2 Pengaruh Pengawasan (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) di Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Hasil kajian mengenai analisis yang dilakukan dan uji hipotesis diatas, menunjukan bahwa variabel pengawasan dana (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Brakas kecamatan Dempet kabupaten Demak. Uji hipotesis menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,054 > 0,05$ artinya nilai signifikan tersebut tidak dapat diterima karena nilai lebih dari 0,05.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terkait yang dilakukan oleh Roundhotu Jannati (2020) yang menyatakan bahwa Pengawasan dana desa tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektifitas pengelolan dana desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dengan judul peran partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Brakas kecamatan Dempet kabupaten Demak diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel partisipasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Brakas kecamatan Dempet kabupaten Demak. Uji hipotesis menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ artinya nilai signifikan tersebut dapat diterima karena tidak lebih dari 0,05.
2. Variabel pengawasan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Brakas kecamatan Dempet kabupaten Demak. Uji hipotesis menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,054 > 0,05$ artinya nilai signifikan tersebut tidak dapat diterima karena nilai lebih dari 0,05.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentu bukan merupakan hal yang sempurna karena masih terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Keterbatasan konseptualisasi penelitian ini merupakan penugasan objek-objek yang terkait dengan variabel independen, sehingga mungkin ada variabel yang tidak berada dalam kerangka konseptual tetapi juga saling terkait satu sama lain atas pengelolaan dana desa di desa Brakas, kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.
2. Mengenai pelaksanaan penyebaran kuesioner, banyak responden merasa takut jika terjadi sesuatu ketika mereka mengisi jawaban atas kuesioner yang dibagikan.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di atas, ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Bagi desa Brakas, kecamatan Dempet, Kabupaten Demak harus terus mendukung tujuan yang baik dengan mengambil tanggung jawab penuh dan relevan, menginformasikan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik itu perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas akhir musim. Selain itu, desa menganjurkan untuk menggunakan akuntansi berdasarkan akuntansi syariah yang menerapkan prinsip tanggung jawab pengelolaan dana desa dengan prinsip akuntansi syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Brakas, kecamatan Dempet, Kabupaten Demak karena masih ada banyak variabel yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Brakas, kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggraeni. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo) . *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi*, 16.
- Daton, D. B. (2022, 1 14). *Mengawasi Dana Desa*. Retrieved from Ombudsman.go.id: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--mengawasi-dana-desa>
- Ghozali, I. (2013). *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, T. (2007). Fakta dan Konsep Geografi. *Interplus*, 103.
- Hartono, B. S. (2021). Alokasi Anggaran Intellectual Capital, Kinerja Keuangan, dan Indikator Kinerja Utama Badan Layanan Umum. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*.
- Huraerah, A. (n.d.). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. *Humanfora*, 109.
- Jannati, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan Dana Desa Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. 14.
- Mada, S. L. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*.
- Manajemen, T. P. (2007). *Modul Praktikum: Metode Riset Untuk Bisnis dan Manajemen*. Bandung: Badan Penerbit Universitas Widyatama.
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. *Andi*, 19.

- Mayuko, M. G. (2018). Optimalisasi Penyelenggaraan Dana Desa. *Journal Transformativa*, Vol. 4.
- Muslimin, M. d. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kanupaten Jeneponto. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol II.
- Nisfiannoor, M. (2009). *Pendidikan Statistika Modern*. Jakarta: Salembara Humaika.
- Nugroho, U. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. *CV Sarnu Untung*, 10.
- Rianto, S. d. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Sleman: Deepubliser.
- Santoso. (2018). *Statistika Hospital*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Seran, S. (2020). *Metode Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Sitompul, E. G. (n.d.). Teknik Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 9 Jilid 1. 18.
- Soemarwoto, S. (2018). Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita. *CV Budi Utama*, 172.
- Solekhan. (2012). Penyelenggara Pemerintah Desa. *Setara Pres*, 33.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharyadi, d. (2009). Statistika. *Salemba Empat*, 7.
- Sukarno, S. (2023, Januari 11). Retrieved from [bpkp.go.id: https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA](https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA)
- Sutarjo, K. (1965). *Desa*. Bandung: Sumur Bandung.
- Wibisono, D. (2013). *Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Widjaja. (2003). *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yohanes, W. (2020). Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal EKonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*, 26.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

QUISIONER PENELITIAN

Berikut adalah quesioner yag berkaitan dengan penelitian “**Peran Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak**”. Dengan itu, disela-sela kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/i, saya memohon kesediaannya membantu saya dalam mengisi quesioner ini. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pekerjaan : a. Petani

b. PNS

c. Pegawai Pemerintah

d. Guru

e. Wiraswasta

d. Lainnya :.....

Petunjuk Pengisian

1. Berikan tanda centang (√) pada kolom yang dipilih sesuai dengan pilihan bapak/saudara/i.
2. Pada masing-masing pernyataan terdapat lima alternatif jawaban yaitu:
 - a. Sangat Setuju (SS) : 5
 - b. Setuju (S) : 4
 - c. Netral (N) : 3
 - d. Tidak Setuju (TS) : 2
 - e. Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

Daftar Pertanyaan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Partisipasi						
1	Saya sebagai masyarakat Desa Brakas merasa bahwa <i>keterlibatan masyarakat</i> dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelola dana desa sudah baik.					
2	Saya sebagai masyarakat Desa Brakas selalu terlibat dalam <i>pengambilan keputusan</i> terkait pengelolaan dana desa.					
3	Saya sebagai masyarakat Desa Brakas selalu diikutsertakan dalam <i>proses evaluasi</i> pelaksanaan program dana desa.					
Pengawasan						
4	Saya sebagai masyarakat Desa Brakas senantiasa melakukan <i>pengawasan program</i> pengelolaan dana desa.					
5	Saya sebagai masyarakat desa Brakas merasa <i>kepastian pelaksanaan</i> program dana desa sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.					

6	Saya sebagai masyarakat Desa Brakas merasa bahwa program dana desa sudah dilaksanakan <i>sesuai aturan</i> yang telah ditetapkan.					
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa						
7	Saya sebagai masyarakat Desa Brakas merasa bahwa pengelola dana desa berprinsip pada nilai <i>kejujuran</i> dalam melaksanakan program					
8	Saya sebagai masyarakat Desa Brakas merasa <i>keterbukan informasi</i> untuk memperoleh akses dokumen publik tentang pelaporan alokasi dana desa mudah diperoleh.					
9	Saya sebagai masyarakat Desa Brakas merasa bahwa <i>kepatuhan pelaporan</i> pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa sudah dilaksanakan dengan baik.					

Lampiran 2
Dokumentasi

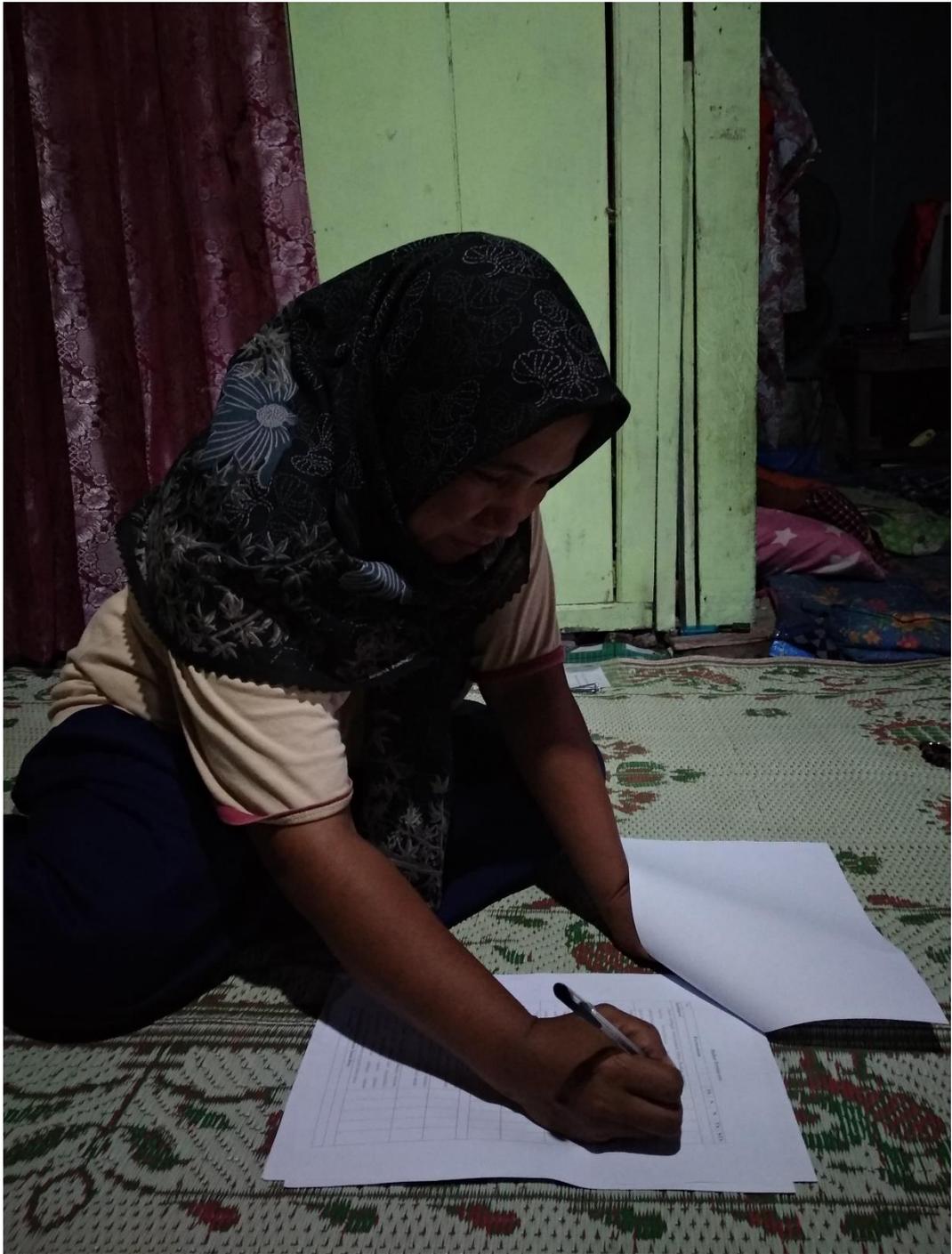








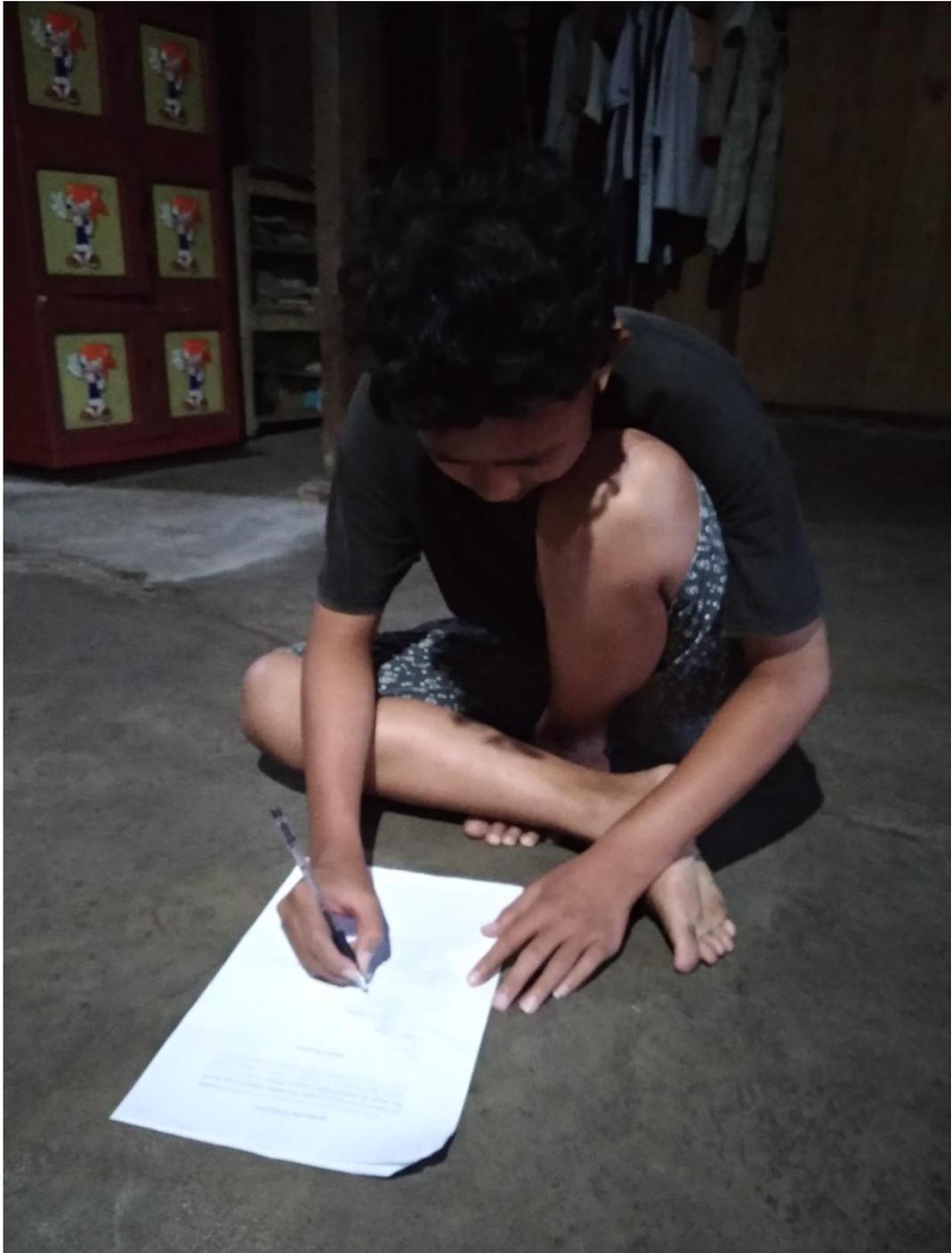


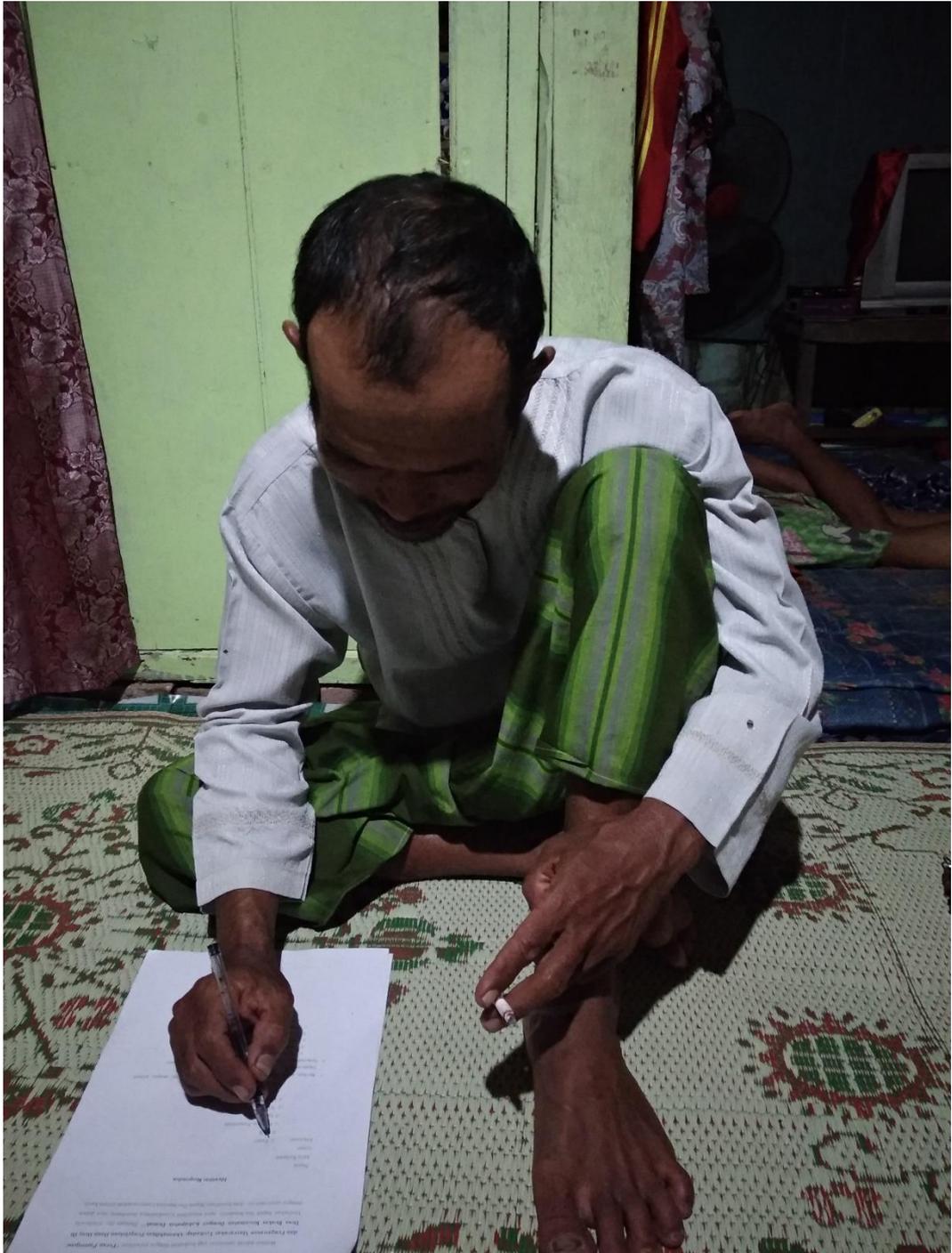












Lampiran 3

Jawaban responden atas masing-masing pertanyaan

No	X1.1	X1.2	X1.3	T.X1	X2.1	X2.2	X2.3	T.X2
1	4	4	4	12	4	4	4	12
2	4	5	5	14	4	4	5	13
3	4	5	5	14	4	5	4	13
4	4	5	4	13	4	5	4	13
5	4	5	5	14	5	4	5	14
6	5	4	5	14	5	4	4	13
7	4	4	4	12	4	4	3	11
8	4	4	5	13	5	4	5	14
9	5	5	5	15	5	4	5	14
10	4	4	4	12	4	5	4	13
11	4	4	4	12	5	5	5	15
12	4	4	4	12	4	4	4	12
13	4	5	5	14	5	5	5	15
14	4	5	5	14	4	4	4	12
15	4	4	4	12	4	5	5	14
16	4	3	3	10	4	4	5	13
17	4	4	4	12	4	3	4	11
18	4	4	4	12	4	4	4	12
19	2	2	1	5	2	2	2	6
20	4	4	4	12	4	5	5	14
21	4	5	5	14	5	4	4	13
22	4	4	5	13	5	5	4	14
23	4	5	5	14	5	4	5	14
24	4	4	5	13	4	4	4	12
25	3	4	4	11	4	4	4	12
26	2	2	4	8	4	2	4	10
27	4	4	4	12	4	5	4	13
28	5	5	4	14	4	5	4	13
29	4	4	5	13	5	5	5	15
30	2	2	2	6	3	2	2	7
31	4	4	3	11	4	4	4	12
32	5	5	5	15	5	4	5	14
33	4	5	4	13	4	5	5	14
34	5	5	5	15	5	4	4	13
35	2	2	3	7	2	2	3	7
36	4	4	5	13	5	4	5	14
37	4	4	4	12	4	5	4	13

38	5	4	4	13	5	5	4	14
39	4	4	4	12	5	5	4	14
40	5	4	5	14	4	5	5	14
41	5	5	4	14	5	5	5	15
42	4	5	5	14	5	4	4	13
43	4	4	4	12	4	4	5	13
44	4	5	5	14	4	4	5	13
45	4	4	4	12	4	4	4	12
46	5	5	4	14	4	5	4	13
47	5	4	5	14	4	5	5	14
48	4	4	5	13	4	5	4	13
49	2	2	1	5	2	2	1	5
50	4	5	5	14	4	5	4	13
51	4	4	4	12	4	2	4	10
52	4	4	4	12	4	4	4	12
53	2	4	4	10	2	4	4	10
54	4	5	5	14	4	5	5	14
55	5	5	4	14	5	5	4	14
56	4	4	4	12	4	4	4	12
57	2	2	4	8	2	2	4	8
58	4	3	4	11	4	3	4	11
59	4	5	4	13	4	5	4	13
60	4	2	2	8	4	2	2	8
61	5	4	4	13	5	5	4	14
62	4	5	3	12	4	5	5	14
63	4	4	4	12	4	5	5	14
64	4	5	5	14	4	5	5	14
65	4	4	4	12	4	5	4	13
66	4	3	4	11	4	5	4	13
67	5	5	4	14	5	5	5	15
68	4	5	5	14	5	4	5	14
69	5	5	5	15	5	4	4	13
70	4	5	5	14	4	5	4	13
71	4	3	4	11	4	4	4	12
72	5	4	4	13	5	4	3	12
73	4	5	4	13	4	4	3	11
74	4	3	3	10	4	4	3	11
75	5	5	5	15	5	4	4	13
76	3	5	2	10	4	5	4	13
77	4	4	3	11	4	4	4	12
78	4	4	4	12	4	4	3	11

79	5	5	5	15	5	4	3	12
80	4	4	4	12	4	4	4	12
81	5	4	3	12	5	4	4	13
82	5	4	4	13	4	4	4	12
83	4	4	5	13	4	4	5	13
84	4	5	4	13	4	5	5	14
85	4	5	4	13	4	5	5	14
86	4	4	5	13	4	5	5	14
87	4	4	4	12	4	5	4	13
88	5	4	5	14	5	5	5	15
89	4	4	4	12	5	5	4	14
90	4	3	4	11	5	4	5	14
91	4	3	4	11	4	5	4	13
92	4	4	3	11	4	5	3	12
93	4	4	4	12	5	5	5	15
94	4	5	4	13	4	5	5	14
95	2	2	1	5	2	2	3	7
96	3	4	5	12	3	4	5	12
97	4	4	2	10	4	3	5	12
98	4	5	5	14	4	5	5	14
99	3	4	4	11	4	5	4	13
100	5	4	5	14	5	5	5	15

No	Y.1	Y.2	Y.3	T.Y
1	5	5	5	15
2	4	4	4	12
3	4	5	5	14
4	5	4	5	14
5	5	4	5	14
6	5	5	4	14
7	4	4	4	12
8	4	5	5	14
9	5	5	5	15
10	4	4	5	13
11	5	5	5	15
12	4	4	4	12
13	5	4	5	14
14	4	4	5	13
15	4	4	4	12
16	4	4	4	12

17	4	5	4	13
18	4	5	5	14
19	2	3	3	8
20	5	4	4	13
21	5	5	5	15
22	5	5	5	15
23	5	5	5	15
24	4	5	5	14
25	4	5	5	14
26	3	2	3	8
27	5	5	4	14
28	5	4	4	13
29	5	5	5	15
30	2	3	3	8
31	4	3	4	11
32	4	4	5	13
33	4	4	4	12
34	5	5	5	15
35	2	2	3	7
36	5	5	5	15
37	5	4	4	13
38	5	5	5	15
39	4	4	4	12
40	5	5	5	15
41	5	5	5	15
42	4	5	5	14
43	4	4	5	13
44	4	4	5	13
45	4	4	5	13
46	4	5	5	14
47	5	5	4	14
48	4	5	5	14
49	2	2	2	6
50	4	4	4	12
51	4	4	4	12
52	5	5	4	14
53	3	4	5	12
54	5	5	5	15
55	5	5	5	15
56	5	5	5	15
57	4	5	5	14

58	3	5	5	13
59	5	4	5	14
60	3	5	4	12
61	5	4	4	13
62	4	5	3	12
63	4	4	4	12
64	4	5	5	14
65	4	4	4	12
66	4	3	4	11
67	5	5	4	14
68	4	5	5	14
69	5	5	5	15
70	4	5	5	14
71	4	5	4	13
72	5	5	5	15
73	4	4	4	12
74	4	5	5	14
75	5	5	5	15
76	5	5	4	14
77	4	5	3	12
78	3	4	4	11
79	5	5	3	13
80	3	4	5	12
81	3	5	2	10
82	5	4	4	13
83	4	3	4	11
84	5	4	4	13
85	5	5	5	15
86	5	5	5	15
87	4	4	5	13
88	4	5	5	14
89	4	5	4	13
90	5	4	5	14
91	3	5	3	11
92	2	5	5	12
93	3	4	5	12
94	4	5	4	13
95	4	4	4	12
96	5	5	5	15
97	4	4	4	12
98	4	5	5	14

99	3	4	4	11
100	5	5	5	15

Karakteristik Responden

Persentase Jenis Kelamin Responden

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	17 – 30	54	54%
2	31 – 40	20	20%
3	41 – 50	16	16%
4	51 – 60	8	8%
5	> 60	2	2%
Jumlah		100	100%

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	42	42%
2	Perempuan	58	58%
Jumlah		100	100%

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	42	42%
2	Pelajar	15	15%
3	Mahasiswa	6	6%
4	Ibu Rumah Tangga	15	15%
5	Wiraswasta	11	11%
6	Guru	8	8%
7	PNS	3	3%
Jumlah		100	100%

Lampiran 4

Uji Validitas dan Reliabilitas

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.486**	.440**	.773**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.486**	1	.527**	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.440**	.527**	1	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.773**	.848**	.808**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	TOTAL_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.478**	.435**	.815**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.478**	1	.467**	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.435**	.467**	1	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.815**	.802**	.782**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.894	9

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.791	3

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.737	3

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165.418	2	82.709	49.455	.000 ^b
	Residual	162.222	97	1.672		
	Total	327.640	99			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.056	.849		5.954	.000
	TOTAL_X1	.430	.103	.505	4.170	.000
	TOTAL_X2	.218	.112	.237	1.953	.054

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

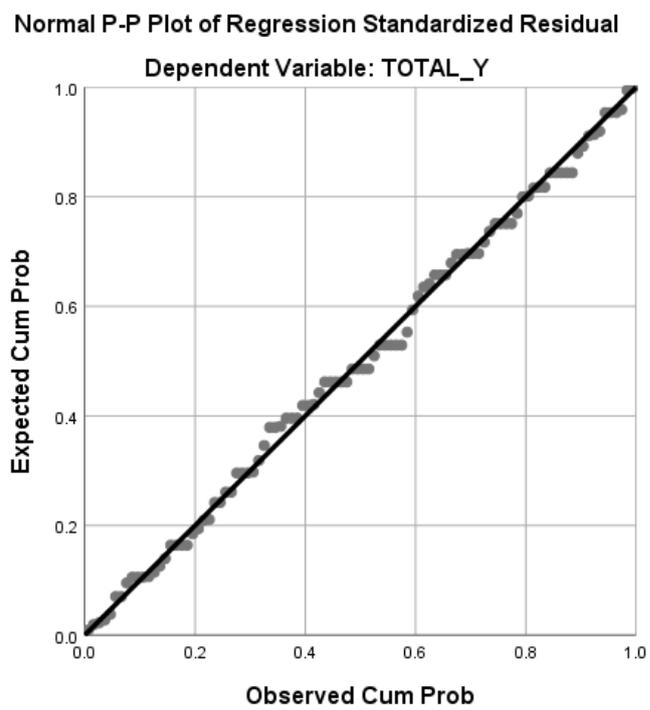
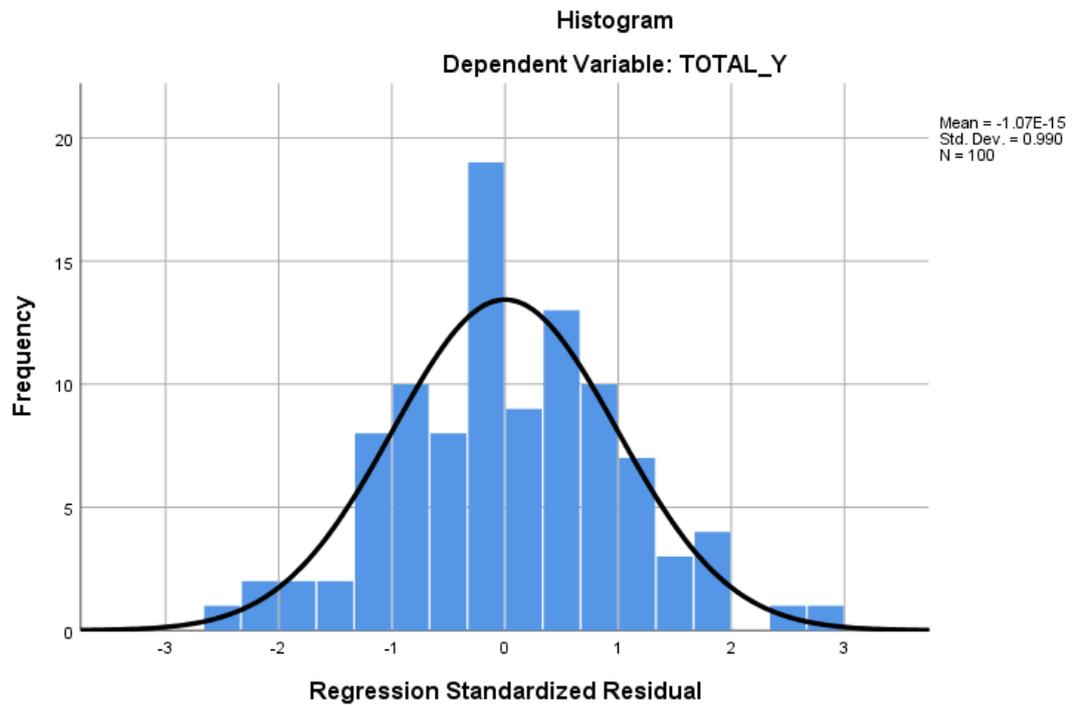
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.28008200
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.051
	Negative	-.048
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

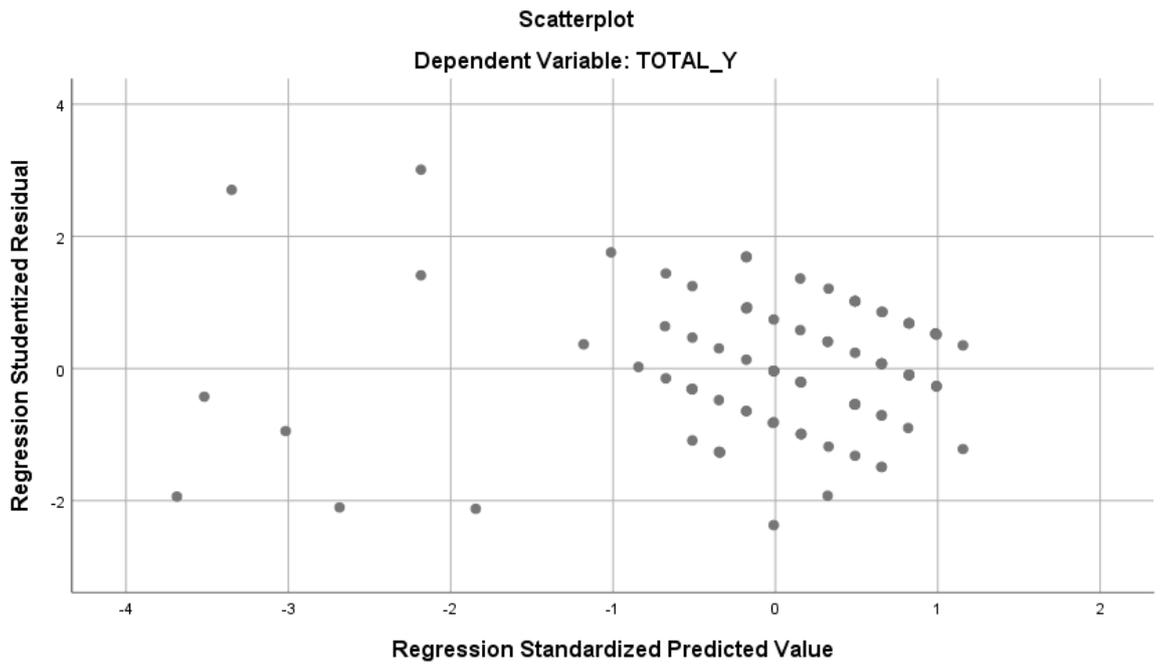
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ainun Naim
Nomor Induk Mahasiswa : 1905046026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 4 Juni 2001
Agama : Islam
Alamat : Brakas Rt.05/Rw.03 Dempet Demak
Email : ainun_1905046026@student.walisongo.ac.id

Riwayat Pendidikan :

1. MIN Brakas (Lulus Tahun 2013)
2. MTs Miftahul Huda Brakas (Lulus Tahun 2016)
3. MA Miftahul Huda Brakas (Lulus Tahun 2019)
4. UIN Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2023)

Pengalaman Organisasi :

1. PR IPNU desa Brakas (Ketua 2018-2020)
2. PAC IPNU kec. Dempet (Ketua 2020-2022)
3. PAC IPNU kab. Demak (Waka. V 2021-2023)
4. PMII Rayon Ekonomi (Ketua Rayon 2021-2022)
5. PMII Komisariat UIN Walisongo (Ketua III 2022-2023)
6. HMJ Akuntansi Syariah (Koor. Diklat 2020-2021)
7. UKM FORSHEI (Divisi Kajian 2020-2021)
8. DEMA FEBI (Kemenlu 2021-2022)
9. DEMA UIN Walisongo Semarang (Menko. Jaringan & Komunikasi 2023)

Motto Hidup : Sukses Karena Menikmati Proses